

MENELISIK KORUPSI ANGGARAN PUBLIK

**Kumpulan
Liputan Isu
Anggaran**

KEGIATAN INI DI DUKUNG OLEH



USAID | INDONESIA

DARI RAKYAT AMERIKA

PROGRAM REPRESENTASI (PROREP)

MENELISIK KORUPSI ANGGARAN PUBLIK
KUMPULAN LIPUTAN ISU ANGGARAN

PENULIS:

Anang Zakaria
Ayu Prawitasari
Eko Widiyanto
Fatkhurrohman taufik
Hendri Dunan
Ramond Eka Putra Usman
Sri Wahyunik
Suwoko
Yose Hendra

EDITOR KOMPILASI:

Dandy Koswara Putra

DESAIN DAN TATA LETAK:

J!DSG, www.jabrik.com

DITERBITKAN OLEH:

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA)
Jalan Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen
Jakarta Pusat 10420 Indonesia
Email: Office@ajiindonesia.org
Website: www.ajiindonesia.org

DIDUKUNG OLEH:

PROREP - USAID

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Prorep.....	5
Kata Pengantar AJI Indonesia.....	7
Main Mata di Balik Lelang Poyek — Ayu Prawitasari	13
Terpasung Uang Jaminan — Ayu Prawitasari.....	19
Penyelewengan Dana PPID Hancurkan Infrastruktur — Ramon Eka Putra Usman	27
Ironi Dana Bantuan Gempa — Yose Hendra	33
Korupsi Jamkesda: RS Tolak Pasien Cuci Darah — Eko Widiyanto.....	43
Orang Sakit Sumbang PAD Tertinggi di Jember — Sri Wahyunik	47
“Mak, Kapan Aku Sekolah?” — Anang Zakaria	51
Program RSBI Dinilai Hanya Pemborosan Anggaran — Fatkhurrohman Taufik	57
SDN Selewengkan Dana BOS Untuk Guru Fiktif — Hendri Dunan	61
JLA Terancam Tak Bisa Digunakan — Suwoko.....	69

KATA PENGANTAR PROREP

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengharuskan Pemerintah Indonesia mulai mengganti sistem penganggaran konvensional (sistem yang berbasis *line item*) dengan dengan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yang selama decade terakhir telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia. Teori PBK sebetulnya relative sederhana, dan bisa diterangkan sebagai upaya untuk membuat ikatan yang kuat antara jumlah anggaran yang direncanakan dengan sejumlah out put atau keluaran yang hendak dicapai. Termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Dengan mendefinisikan hasil program secara jelas ketika merancang program dan menyusun anggaran, pelaksana program mestinya lebih mampu menentukan apakah program mereka berhasil, apakah biaya sesuai dengan anggaran. Mereka juga mestinya bisa lebih memahami mengapa suatu program terlaksana atau tidak terlaksana seperti yang diharapkan.

Meskipun teori Penganggaran Berbasis Kinerja sederhana, melaksanakannya tidaklah mudah. Sebagaimana halnya negara-negara lain yang melaksanakan PBK, Indonesia menghadapi banyak tantangan ketika berusaha melakukannya, salah satunya adalah korupsi, dan tahun lalu, Transparency International menempatkan Indonesia pada Nomor 56 dalam daftar negara paling korup.

Potret buram atas kenyataan ini masih ada meskipun

segala upaya telah dilakukan oleh banyak kalangan untuk memerangi korupsi. Artinya, proses kontinum yang sinergis adalah sebuah keharusan dan perlu diupayakan secara terus menerus. Dalam konteks ini, kehadiran kelompok jurnalis yang peduli terhadap proses penganggaran adalah pompaan semangat baru. Beberapa tahun silam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) telah memulai upaya mengawasi proses penganggaran ini. Proses ini sempat terhenti karena berbagai kendala, namun tahun 2012 semangat AJI bangkit kembali Dengan dukungan ProRep, AJI mengajak anggotanya untuk sama-sama mengawasi proses penganggaran. Kali ini dengan pendekatan yang lebih strategis, yakni dengan terlebih dahulu memperkuat kemampuan paraanggotanya dalam mengenali proses penganggaran. Dengan demikian analisis para jurnalis ini terhadap pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih tajam dan berdasar

Buku ini merupakan kumpulan tulisan para jurnalis yang telah mendapatkan penguatan tersebut. Dengan proses fasilitasi komunitas jurnalis yang peduli anggaran, semoga pengawasan masyarakat atas implementasi penganggaran berbasis kinerja akan memperbaiki protret negeri ini dalam penggunaan keuangan Negara. Selamat buat AJI atas langkah awal ini. Semoga langkah ini menjadi bola salju bagi gerakan masyarakat untuk lebih massif mengawasi penggunaan uang rakyat. Semoga.

John K. Johnson

Chief of Party - ProRep

KATA PENGANTAR AJI INDONESIA

Sepanjang 2012, media massa ramai memberitakan isu kebocoran anggaran pemerintah, menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bahwa 30-40% biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil menguap entah kemana. Nilai kebocoran itu cukup besar, yakni 18 trilyun selama setahun berasal dari instansi pemerintah seluruh Indonesia.

Praktek penyelewengan yang menyebabkan kebocoran anggaran terjadi di hampir semua instansi pemerintah dengan modus yang mirip. Beberapa diantaranya : laporan penggunaan maskapai penerbangan fiktif, jumlah perjalanan dinas yang tidak sesuai, laporan perjalanan dinas palsu, melampirkan tiket “asli tapi palsu”, atau menyetorkan kuitansi pembelian fiktif atau sudah di-markup.

Korupsi perjalanan dinas pada instansi pemerintah seakan menjadi lumrah karena dilakukan banyak orang. Lemahnya pengawasan internal dan tiadanya sanksi berat bagi pelaku membuat penggangsiran anggaran negara melalui perjalanan dinas sulit diberantas.

Data BPK menunjukkan, anggaran perjalanan dinas instansi pemerintah setiap tahun meningkat. Dalam APBN-P 2009 dianggarkan 12,7 triliun, realisasinya bengkok jadi 15,2 triliun. Dalam APBN-P 2010, anggaran perjalanan dinas 19,5 triliun, realisasinya jadi 18 triliun. Dalam APBN 2011, pos

perjalanan dinas PNS dianggarkan sebesar 24,5 triliun. Ini baru dari satu pos anggaran. Tidak ada jaminan pos anggaran lain tidak dikorupsi. Sesuai catatan, masih menurut BPK, pos pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam APBN, tingkat kebocorannya mencapai 70 triliun rupiah setiap tahun.

Kontras dengan praktek korupsi anggaran, beban hidup rakyat sehari-hari kian berat. Naiknya anggaran negara untuk instansi pemerintah (PNS) tidak sebanding dengan pelayanan mereka kepada masyarakat. Sayangnya, publik cenderung bersikap pasif, meskipun tahu anggaran negara ditilap berjamaah dalam jumlah gila-gilaan. Angka APBN yang disiarkan media massa tiap tahun seakan tidak dihiraukan publik. Sikap masa bodoh seperti ini bagaimanapun ikut melanggengkan praktek penggangsrangan anggaran negara oleh instansi pemerintah. Padahal 80 persen dana APBN berasal dari pajak masyarakat. Rakyat seharusnya peduli dengan kebocoran anggaran itu karena secara tidak langsung berdampak pada kehidupannya sehari-hari.

Sebagai sumber informasi publik, media massa dituntut menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya dalam isu transparansi anggaran. Para jurnalis juga harus mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap praktek penyelewengan anggaran. Untuk menjadi pewarta yang mampu menyajikan informasi berbobot, akurat, dan dipercaya, setiap jurnalis membutuhkan kemampuan teknis dan amunisi yang cukup. Disinilah peran Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam melatih dan meningkatkan kapasitas anggotanya yang tersebar di 36 kota seluruh Indonesia.

Melalui pelatihan dan workshop jurnalis isu Transparansi Anggaran, AJI Indonesia menggandeng Prorep-USAID sebagai mitra utama. Pada tahap pertama, Maret-Agustus 2012, pelatihan isu Transparansi Anggaran melibatkan

jurnalis di tiga kota : Padang, Yogyakarta, Surabaya. Namun pada prakteknya, pelatihan isu Transparansi Anggaran ini melibatkan jurnalis di sebelas kota, meliputi Jambi, Pakanbaru, Bojonegoro, Malang, Kediri, Jember, Solo dan Semarang. Ini merupakan efek domino sistem regionalisasi AJI yang mulai dikembangkan penuh dalam kepengurusan AJI sekarang.

Dalam pelatihan dan workshop isu Transparansi Anggaran ini jurnalis lintas media dari berbagai kota dilatih memahami seluk-beluk politik anggaran, aktor-aktor yang berperan, membaca format APBN/APBD, hingga penyalahgunaan anggaran, dan bagaimana publik ikut mengawasi anggaran negara. Narasumber pelatihan dan workshop didatangkan dari berbagai lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR-RI, akademisi, LSM pegiat anti korupsi, dan trainer jurnalis.

Buku “Menelisis Korupsi Anggaran Publik” merupakan kumpulan tulisan terbaik jurnalis peserta pelatihan isu Transparansi Anggaran kerja sama AJI Indonesia-Prorep USAID. Ada sembilan karya liputan terbaik peserta training disajikan kepada publik, agar lebih banyak orang membaca dan mengawasi anggaran negara untuk sektor publik. Para jurnalis umumnya menulis isu korupsi atau penyelewengan anggaran di kotanya, penggunaan anggaran daerah yang salah sasaran, juga menyoroti dana pendidikan dan dana bantuan bencana yang diselewengkan aparat pemerintah.

Buku ini seharusnya terbit Agustus tahun lalu, menyusul berakhirnya program penguatan kapasitas jurnalis isu transparansi anggaran periode Maret-Agustus 2012. Namun, kerjasama AJI Indonesia - Prorep ternyata berlanjut ke tahap kedua, Mei-Desember 2013, menambahkan dua kota penerima program : Lampung dan Kediri. Saya berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan Prorep USAID kepada AJI

Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada para jurnalis yang sudah mengikuti training isu Transparansi Anggaran, terutama mereka yang karya tulisnya terpilih untuk dibukukan. Saya menanti karya jurnalistik lainnya untuk dipublikasikan lebih luas, bagian dari tugas jurnalis menyelamatkan anggaran negara dari praktek manipulasi dan korupsi anggaran oleh aparaturnegara.

Eko Maryadi

Ketua Umum AJI Indonesia



AYU PRAWITASARI,
reporter Harian Umum *Solopos*
desk Laporan Khusus sejak
2005. Lulusan S1 Sastra Inggris,
dan sedang mengambil S2
Pengkajian Amerika.

MAIN MATA DI BALIK LELANG POYEK

Oleh **Ayu Prawitasari**

Dipublikasikan di Koran *SoloPos*

Sinar matahari memanggang aspal abu-abu jalan Gayam, Karangasem, Solo. Panasnya memaksa orang untuk bersembunyi di teras atau di dalam rumah sekedar mendapat keteduhan. Jarang sekali terlihat orang melintas hingga beberapa menit menunggu di salah satu sudut jalan, seorang pria dari gang sebelah nampak melangkah bergegas.

Alisnya berkerut saat membaca alamat sebuah kantor CV yang saya sodorkan. “Di mana ya?” gumannya sendiri. Dia melanjutkan membaca. “CV Karunia Mekar Abadi saya tak tahu. Tapi kalau yang kerjanya berhubungan dengan pembangunan, itu rumahnya. Nomor 26. Namanya Pak Gatot. *Priyayinya* bekerja di DPU (Dinas Pekerjaan Umum),” ujarnya seraya menunjukkan sebuah rumah bercat abu-abu gelap besar dengan antena parabola yang bertengger di bagian belakang, Rabu (18/7).

CV Karunia Mekar Abadi. Persekutuan komanditer ini disebut DPU dalam lembar pengumuman hasil lelang pembangunan saluran drainase sekunder paket satu dengan dana APBD 2012 senilai Rp1,1 miliar sebagai pemenang. Masih di lembar yang sama disebut alamat CV KMA adalah Jl Gayam No 43 B Solo.

Masih di gang yang sama, jarak kurang lebih delapan rumah dari kediaman Gatot Tri Widodo yang merupakan sekretaris panitia lelang pengadaan saluran drainase yang dimenangkan oleh CV KMA, seorang wanita tengah sibuk menyapu halaman depan rumah. “Kalau no 43 B memang rumah ini. Sebentar saya panggil bapak dulu,” ujarnya seraya menghilang ke dalam rumah.

Mengenakan sarung ungu dan kaus berkerah, seorang laki-laki tua sambil membawa sebuah buku kuning memasuki ruang tamu. “Ini memang CV KMA.” Namun Sutrasno, begitu nama laki-laki itu melanjutkan kantornya tidak berada di lokasi yang sama. Seperti halnya sang pemilik yang tinggal di Karanganyar, kantor CV KMA juga berada di sana.

Sutrasno menambahkan, alamat rumahnya selama ini sebatas dipinjam oleh Andri, sang pemilik CV KMA, sebagai alamat kantornya. “Kebetulan Andri itu teman anak saya sekolah dulu. Karena proyek-proyek Pak Andi banyak di Solo, makanya dia pinjam alamat saya. Ya belum lama sebenarnya. Tak sampai empat tahun,” jelasnya seraya menyebut nomor ponsel Andri yang tertera di buku kuning yang ia pegang.

Alamat pemenang lelang yang masih satu gang dengan sekretaris panitia lelang menurut pemilik PT Agung Waskita yang juga menjadi peserta pengadaan saluran drainase paket satu, Suyadi sudah ia ketahui. Namun itu belum lama, imbuhnya. Baru dua hari setelah pemenang lelang diumumkan pada 15 Juli lalu secara elektronik.

“Setelah saya dinyatakan kalah dengan alasan yang saya nilai mengada-ada saya langsung mencari alamat CV pemenang. Yang mengecewakan, alamat CV pemenang ternyata satu gang dengan alamat panitia. Apa iya sekedar kebetulan saja,” ujarnya.

Disinggung mengenai alamat pemenang yang sebenarnya hanya alamat pinjaman, Yadi menjawab tidak tahu. Namun apabila itu benar menurutnya menjadi lebih mencurigakan lagi. Dugaan adanya kolusi dalam lelang drainase menjadi sulit dipungkiri. Sebab, imbuh dia, Gatot sebagai sekretaris pengadaan semestinya tahu kondisi tersebut.

“Dalam Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebut bahwa peserta lelang harus punya domisili tetap. Artinya kan mereka itu harus punya alamat jelas, kantornya ada, stafnya ada, semuanya jelas. Kalau tak punya kantor tapi hanya kotak pos itu bagaimana statusnya? Aneh sekali *kan* kalau Pak Gatot yang rumahnya berdekatan dengan alamat pemenang tidak tahu kondisi itu. Jangankan bisa menang lelang, bisa lolos sebagai peserta lelang juga patut dipertanyakan kalau demikian,” tegas Yadi.

Tak hanya soal alamat, Yadi mengaku juga menangkap berbagai kegagalan sejak lelang drainase diumumkan. Dia menyebut persyaratan lelang yang mengharuskan adanya sertifikat keahlian (SKA)-tenaga ahli setingkat sarjana-hingga empat orang padahal nilai proyek hanyalah Rp1 miliar. Logikanya untuk proyek tak lebih dari 1 miliar yang diperuntukkan bagi kontraktor kecil hanya membutuhkan maksimal dua SKA.

“Kontraktor kecil itu kan sama dengan pengusaha kecil. Modalnya terbatas, SDM terbatas, semua serba terbatas. Makanya Perpres terbit untuk melindungi kami dari diskriminasi semacam ini. Nah kalau sudah ada Perpres tapi tetap dilanggar bagaimana. Kasihan kan saya dan teman-teman ini yang di kota sendiri saja untuk cari makan susah,” sesalnya.

Hampir sama dengan lelang pembangunan drainase,

dalam lelang pembangunan talut Kali Gajah Putih yang juga diikuti CV Agung Waskita dan dimenangkan CV Ardian, Yadi lagi-lagi dibuat geleng kepala. Pasalnya, CV Ardian sebagai pemenang lelang setelah ia cek tidak terdaftar dalam Lembaga Jasa Pengembangan Konstruksi (LPJK) yang bisa diakses secara online melalui situs www.lpjk.net. Sebaliknya, CV Ardian justru terdaftar dalam situs www.lpjk.org yang tidak diakui pemerintah pusat.

“Bahkan meski terdaftar di situs tak resmi, masa perizinan CV Ardian juga sudah habis sejak 6 Juli lalu. Itu kan aneh sekali. Bagaimana mungkin CV yang masa perizinannya habis bukan hanya bisa ikut lelang namun juga bisa jadi pemenang,” tuding Yadi.

Yang terjadi pada Yadi menurut seorang kontraktor sebut saja Bowo (bukan nama sebenarnya) sudah lazim di Kota Solo. “Pakai LPSE atau manual sama saja. Malah ketika sudah pakai LPSE panitia seperti raja kecil saja. Mereka berhak membuat peraturan sendiri yang aneh-aneh dengan hasil pemenang yang aneh-aneh juga. Nah supaya menjadi pemenang itu juga tidak gratis. Ada ongkosnya. Biayanya kata teman-teman antara 1% sampai 2% tergantung nilai kontraknya,” ujar dia. Bahkan untuk DPU sebagai penyelenggara lelang, menurut kontraktor lain Doni (bukan nama sebenarnya) juga ada setoran khusus hingga maksimal 8% dari nilai kontrak.

Kepala DPU Solo, Agus Joko Witiarso mengatakan lelang infrastruktur yang diselenggarakan di Kota Bengawan sudah sesuai dengan prosedur. Dalam membuat aturan lelang, panitia juga sudah mengacu kepada Perpres.

“Kalau saya lihat lelang-lelang yang sudah berjalan, semua sudah sesuai prosedur. Sesuai Perpres. Saya sendiri tidak punya kapasitas untuk melakukan intervensi kepada panitia,”

kata Agus. Selanjutnya soal uang suap untuk panitia dan DPU, Agus dengan tegas membantah. “Saya tak pernah menerima yang seperti itu.”

PAKET INFRASTRUKTUR YANG BERMASALAH

1. PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE SEKUNDER PAKET 1

Nilai pagu paket : Rp 1.131.000.000
 Peserta : • CV Cipta Surya Buana
 • CV Karunia Mekar Abadi
 • CV Catur Tunggal
 • PT Agung Waskita
 Pemenang : CV Karunia Mekar Abadi
 Harga penawaran : Rp 1.022.232.000
 Harga terkoreksi : Rp 1.022.232.000

2. LANJUTAN PEMBANGUNAN TALUT GAJAH PUTIH

Nilai pagu paket : Rp 883.500.000
 Peserta : • CV Agung Waskita
 • CV Catur Tunggal
 • PT Daya Sakti
 • CV Atunggal Bharata
 • CV Nadita
 • CV Ardian
 Pemenang : CV Ardian
 Harga penawaran : Rp 804.010.000
 Harga terkoreksi : Rp 804.010.000

3. REHAB JEMBATAN KOMPLANG

Nilai pagu : Rp 2.299.000.000
 Peserta lelang : • CV Karya Darma
 • CV Griya Karya
 • CV Wahyu Pradana
 • CV Kusuma Wijaya
 • CV Jaya Sempurna Abadi
 Pemenang : CV Karya Darma
 Harga penawaran : Rp 2.183.000.000
 Harga terkoreksi : Rp 2.183.000.000

SUMBER: LPSE KOTA SURAKARTA APS

PERPRES 54/2010

PASAL 6:

- b. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- g. menghindari penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan dan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

PASAL 56

- (10) ULP/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta di luar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Perpres ini.
- (11) ULP/pejabat pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. meminta penyedia barang/jasa mengisi formulir kualifikasi
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi

PASAL 81

- (3) jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar 2‰ (dua per seribu) dari nilai total harga perkiraan sendiri atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000

PASAL 100

- (3) nilai paket pengerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai Rp 2,5 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil serta koperasi kecil

TERPASUNG UANG JAMINAN

Oleh **Ayu Prawitasari**

Dipublikasikan di Koran *SoloPos*

Beberapa kali Sugi mencermati persyaratan yang tertera dalam dokumen pengadaan rehab Jembatan Komplang, Solo bersama sejumlah rekannya. Alisnya bertaut namun sekejab kemudian tawanya pecah. Sejumlah rekan yang mendampinginya ikut tertawa bersama.

Pertemuan itu terjadi awal Juli lalu di sebuah gerai kopi sebuah pusat perbelanjaan. Yang membuat para kontraktor tertawa lantaran syarat-syarat lelang yang dicantumkan panitia lelang dalam dokumen pengadaan mereka nilai sangat mengada-ada. Untuk proyek senilai Rp2,3 miliar, kontraktor kecil harus menyediakan delapan tenaga ahli setara sarjana. Syarat berlebihan lain, kontraktor juga harus mengirim neraca perusahaan serta KTP yang berlaku untuk para stafnya.

“Saya tak tahu bagaimana logika DPU. Perusahaan kecil jelas tidak bisa menggaji delapan orang sarjana. Pakai uang apa? Itu ranah perusahaan besar dengan proyek puluhan hingga ratusan miliar. Soal neraca lagi, sebenarnya *kan* ya tidak perlu ketika sudah ada jaminan penawaran dari bank atau asuransi. Neraca itu dapurnya perusahaan. Begitu pula dengan syarat KTP staf. Ini yang disewa jasa perusahaan kan? Bukan jasa konsultan. Kalau yang disewa jasa konsultan, syarat KTP yang berlaku masih masuk akal. Lama-lama saya cemas

nanti ijazah SD sampai SMA saya juga harus dilampirkan,” tukas pelaksana CV Griya Karya ini geleng-geleng kepala.

Satu pekan sesudahnya Sugi dan kawan-kawan berkumpul lagi di tempat yang sama. Saat itu nama pemenang lelang sudah ditetapkan. Sudah bisa ditebak sejak awal menurut Sugi bahwa dia kalah akibat syarat yang ia nilai mengada-ada. Dia dinyatakan gugur lantaran ada KTP staf yang sudah habis masa berlakunya serta tidak adanya bukti sewa atau pinjam alat.

“Yang alasan KTP tak mau saya pikirkan sebab hanya buang-buang waktu. Penyebab yang kedua sebenarnya yang saya nilai keterlaluhan sekarang sebab kalau memang ada yang kurang di antara seabrek persyaratan itu sebenarnya *kan* bisa diklarifikasi. Tidak boleh langsung digugurkan,” tegasnya.

Sugi pantang menyerah. Pekan ketiga Juli ini dia kembali memberikan informasi tentang niatnya untuk melakukan sanggah banding setelah surat sanggahnya yang pertama tidak mendapat jawaban yang memuaskan. Tak hanya mempersoalkan jawaban namun dia juga mempersoalkan nilai jaminan untuk sanggah banding.

Merujuk kepada pasal 81 ayat tiga Perpres 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ungkap Sugi, disebut bahwa jaminan sanggah banding ditetapkan 2 per seribu dari total HPS atau paling tinggi senilai Rp50 juta. Yang memprihatinkan, imbuhnya, meski nilai proyek rehab Jembatan Komplang hanya Rp2,3 miliar namun jaminan sanggah banding menggunakan angka maksimal, hingga Rp. 50 juta. Sugi menambahkan tak bisa membayangkan angka maksimal juga digunakan untuk proyek bernilai ratusan miliar rupiah.

“Pemerintah sangat diskriminatif. Sekarang saya paham

kenapa teman-teman tak ada yang berani sanggah banding. Untung tak sampai Rp.50 juta tapi uang jaminan besarnya keterlaluan.”

Terpisah usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPRD Solo, Rabu (18/7), Kepala DPU, Agus Joko Witiarso mengatakan penetapan jaminan lelang sudah sesuai Perpres. Selanjutnya untuk sanggah banding yang dikirim CV Griya Karya saat ini masih dipelajari Pemkot apakah layak atau tidak mendapat jawaban.

Fakta bahwa kontraktor hanya mengirim nilai jaminan sebesar 2/1.000 diakui Agus menjadi kendala. “Tapi ya tidak hanya uang jaminan. Banyak hal yang menjadi pertimbangan kami apakah surat ini layak atau tidak diteruskan kepada Walikota,” tegasnya. Untuk menelaah layak tidaknya surat sanggah banding tersebut DPU dibantu oleh Inspektorat serta Bagian Hukum Setda. Diakui Agus munculnya sanggah banding membuat tahapan pengerjaan rehab jembatan menjadi mundur.

FPSJK: ATURAN LELANG DISKRIMINATIF!

Semangat Perpres 54/2010 adalah melindungi kontraktor kecil. Ketua Forum Pengusaha Swasta Jasa Konstruksi (FPSJK) Indonesia, Sukardi lantas mencontohkan pasal 19 dalam peraturan perundangan yang sama.

“Mencermati pasal 19 khususnya huruf g itu kan sudah jelas. Penyedia barang atau rekanan yang bekerjasama dengan pemerintah wajib punya kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil. Tak ada alasan aneh-aneh seperti tenaga ahli lebih dari lima orang atau tenaga ahli utama untuk proyek yang kurang dari enam atau tujuh miliar yang intinya mengarah kepada

diskriminasi serta syarat-syarat sulit yang lain,” ujarnya pekan lalu.

Dengan adanya syarat-syarat sulit, tambah Kardi mengesankan ada sesuatu dengan panitia lelang. Sebab merekalah yang menentukan syarat-syarat tersebut. Bagi pemenang lelang pun, lanjut Kardi, sudah bisa ditebak diduga menggunakan cara-cara yang tak benar supaya bisa memenangkan lelang. Salah satunya dugaan pemberian uang suap untuk memuluskan upaya memenangkan lelang.

“Pratik-praktik seperti ini banyak saya dengar. Yang namanya kontraktor kecil itu jelas tak punya banyak ahli sebab mau digaji pakai uang apa? Lagipula pekerjaan mereka kan tidak kompleks sehingga wajar kalau tak perlu banyak tenaga ahli apalagi yang utama (lebih dari 15 tahun),” tegas dia. Pertanyaannya, untuk apa pekerjaan yang tidak kompleks seperti membangun gedung sederhana serta nilai proyek di bawah Rp5 miliar harus pakai tenaga ahli utama.

Syarat yang mengada-ada dari DPU, diakui kontraktor sebut saja Adi (bukan nama sebenarnya) membuat para kontraktor yang sudah “bermain” dengan panitia melakukan perbuatan curang. “Karena dari awal sudah dipesan syaratnya ini..ini..ini..sampai tenaga ahli utama, kontraktor kecil biasanya langsung mencari. Saya sendiri pernah ditawarkan yang seperti itu. Beli sertifikat tenaga ahli madya (pengalaman 8 tahun) misalnya harus bayar Rp5 juta sementara yang utama harganya Rp10 juta. Tanpa kursus, ujian dan tetek bengek tahapan mengurus sertifikat itu, hanya dalam waktu dua sampai tiga hari sertifikat terbit,” kata Adi.

PEMENANG KLAIM LELANG FAIR

Berbekal nomor ponsel Andri yang diberi Sutrasno, bos CV

Karunia Mekar Abadi itu pun akhirnya berhasil dihubungi.

Andri mengukui alamat di Jl Gayam adalah alamat seorang teman. Palsunya, saat ini dia ada di Jl Ir Sutami, Pucangsawit. Saat ditanya kenapa tidak menggunakan alamat di Pucangsawit Andri menjawab kepindahannya masih dalam proses.

Selanjutnya ketika ditanya alamat lengkap di Jalan Ir Sutami, Andri tak segera menjawab. “Untuk apa?” tanya dia. Andri baru memberikan alamat lengkap saat Espos mengatakan akan mengecek alamat yang bersangkutan.

Mengenai alamat kantornya yang tak jelas namun bisa memenangkan lelang menurut Andri wajar-wajar saja. Sebab dalam tahapan lelang ada proses klarifikasi yang merupakan kewajiban panitia lelang.

“Panitia kan minta klarifikasi soal alamat kantor, jadi tidak ada masalah,” jawab Andri. Namun saat ditanya mengapa peserta lain khususnya Agung Waskita dalam lelang sama tidak pernah dimintai klarifikasi sehingga tahu-tahu ada kesalahpahaman yang ada langsung membuatnya gugur, Andri tidak mau menjawab. Dia buru-buru menutup telepon dengan alasan ada telepon masuk di nomor lain.

Terpisah, pemenang lelang pembangunan Talut Gajah Putih, Ari mengatakan tahapan lelang sudah ia lalui sesuai prosedur. Soal masa perizinan usaha yang dituding rekannya sesama kontraktor sudah habis masa berlakunya, Ari membantahnya dengan tegas.

“Perizinan saya lengkap semua. Masih berlaku semua. Tidak benar kalau dikatakan sudah habis. Mana berani saya mendaftar kalau syarat-syarat saya tak lengkap,” ujarnya.

Sementara itu Manajer II Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPKJ) Jateng Bagyo Surono menjelaskan situs

www.lpjk.org memang tidak lagi diakui oleh pemerintah pusat. Pasalnya pengurus di LPJK.org tidak mematuhi dan melaksanakan PP 4/2010 Tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) 10/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Pengembangan Jasa Konstruksi. Saat ini menurut Bagyo yang diakui oleh pemerintah hanyalah pengurus LPJK yang bisa diakses melalui www.lpjk.net.

Mengenai status CV Ardian yang tercatat di LPJK.org, menurut Bagyo harusnya segera dibenahi. Tentang masa berlaku izin usaha, diakui Bagyo CV yang bersangkutan sudah tidak punya izin yang berlaku lantaran sudah habis sejak 6 Juli lalu.

KONTRAKTOR LOKAL DI PINGGIRAN JALAN

Siang itu Adi (bukan nama sebenarnya) memilih duduk santai di ruang tunggu kantornya. Setumpuk dokumen ia biarkan berserakan di meja.

“Persaingan usaha di Kota Solo sudah tak sehat,” katanya membuka percakapan, Selasa (17/7). Sebab dari 20 proyek lelang skala kecil di Kota Bengawan hanya diikuti dan dimenangkan tak lebih dari tujuh kontraktor. Syarat lelang yang dia nilai mengada-ada membuat para kontraktor lokal tidak bisa ikut persaingan.

Bukan hanya tak mampu berkompetisi melalui jalur lelang, Adi menambahkan, untuk melakukan sanggahan kontraktor juga tidak berani. Penyebabnya DPU sering menerapkan nilai jaminan maksimal sementara keuntungan proyek jauh lebih kecil daripada nilai jaminan yang ditetapkan. “Dari pada malah rugi ya lebih baik diam saja. Mau bagaimana lagi. Ini

yang saya sesalkan, kontraktor lokal di Solo ini bukannya berkembang tapi justru terpinggirkan,” ujar dia.

Terpisah Ketua Gapensi Solo Setyo Budiyanto mengakui juga mendapat banyak keluhan dari para anggotanya mengenai rumitnya mengikuti proses lelang di Kota Bengawan. “Teman-teman banyak yang mengeluh soal syarat lelang yang mereka nilai terlalu sulit. Karena banyaknya keluhan dari anggota, pekan lalu sengaja kami datangkan orang dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memberikan penjelasan mengenai isi Perpres 54/2010,” jelasnya.

Sebagai kesimpulan dari pertemuan dengan tokoh dari LKPP tersebut, sambung Budi, kontraktor diminta mengambil sikap berani ketika mengikuti lelang. Artinya apabila dalam sebuah lelang ditemui syarat yang mengada-ada, jangan takut untuk menyanggah.



M. RAMOND EKA PUTRA USMAN, menjadi jurnalis di Harian Pagi *Jambi Star* (Jawa Post Group) sejak 2006, pria kelahiran Muarasabak, Jambi, 26 Oktober 1983 ini juga menjabat pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jambi periode 2011-2014.

Lulusan Akademi Maritim Sapta Samudra, Padang ini sering ditugaskan meliput bidang politik dan pemerintahan.

PENYELEWENGAN DANA PPID HANCURKAN INFRASTRUKTUR

Oleh **Ramon Eka Putra Usman**
Dipublikasikan di *Jambistar.com*

JS-Warga yang bermukim di kawasan Transmigrasi Sosial Spintun mesti ekstra hati-hati dan sabar jika ingin keluar dari desa mereka mengingat jalur jalan yang rusak parah serta licin dan berlumpur. Mereka harus meniti sedikitnya delapan jembatan kayu yang kondisinya sudah lapuk dan berlubang. Sarana transportasi yang sedemikian minim ini merupakan pemandangan sehari-hari warga di provinsi Jambi tersebut.

Permukiman Transmigrasi Sosial Spintun dibangun sejak tahun 1997. Penghuninya merupakan warga lokal yang ada di kawasan Kecamatan Pauh. Seiring dengan perjalanan waktu, kawasan itu kini berkembang menjadi permukiman padat dan akhirnya terbagi menjadi dua desa, yakni Desa Sekobesar dengan penduduk sekitar 259 kepala keluarga dan Desa Spintun II, dihuni 300 kepala keluarga.

Lima tahun kemudian kawasan itu dimekarkan kembali dengan program sama, yaitu program Transmigrasi Sosial, tepatnya tahun 2003, khusus untuk permukiman bagi warga Suku Anak Dalam. Kini bernama Dusun Pulaigading, dihuni 213 kepala keluarga.

Tingkat kehidupan mereka dari hari kehari terus

mengalami peningkatan. Dengan mengandalkan kebun karet mereka sudah bisa menikmati kehidupan lebih baik. Hanya saja sayangnya sejak awal menempati kawasan tersebut, warga setempat hingga kini masih terus dihadapkan pada kondisi sarana transportasi yang belum memadai, karena satu-satunya sarana jalan yang menjadi andalan mereka tak kunjung berubah.

Bahkan sarana jalan yang ada sekarang ini bukan merupakan hasil karya pemerintah melainkan para pembalak liar untuk mengangkut kayu hasil curian keluar menuju jalan lintas tengah yang menghubungkan Kota Sarolangun menuju Kota Jambi. Pemerintah daerah setempat memang sudah beberapa kali melakukan perbaikan ringan, namun hasilnya pun tak merubah kondisi warga transmigrasi ini lepas dari keterisolasian.

Terakhir kali pemerintah melakukan perbaikan jalan pada 2011 dengan menggunakan dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) sebesar Rp 24,7 miliar, dengan rincian pekerjaan; pengerasan jalan sepanjang 17.500 meter dari kilometer 20 ke Desa Taman Bandung dan perbaikan delapan unit jembatan dan pemasangan di 21 titik gorong-gorong.

Masyarakat setempat mengatakan apabila proyek tersebut dijalankan secara sungguh-sungguh dan transparan kemungkinan besar akan mampu memenuhi harapan warga atas tersediannya sarana jalan yang memadai. Kabar tentang proyek perbaikan jalan itu sendiri telah membuat warga sekitar senang karena memberikan harapan bagi mereka akan kelayakan infrastruktur guna mengurangi penderitaan saat bepergian.

“Kami sangat senang setelah mendengar jika jalur jalan ini akan segera diperbaiki, sehingga kesulitan transportasi dialami warga selama ini akan segera berakhir,” kata Ahmadi, 34 tahun, salah seorang warga Desa Taman Bandung, kepada koran ini, Senin (16/7).

Namun, harapan hanya tinggal harapan, perbaikan jalan yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. “Memang ada kegiatan pengerasan jalan, tapi tidak membawa perbaikan. Jalan kami tetap saja berlumpur dan licin, jembatan rusak serta gorong-gorong hancur tidak ada perubahan,” kata Abdul Aziz, Kepala Desa Taman Bandung, ketika itu.

Menurut Abdul Aziz, PT Waskita Karya dan Konsultan Pengawas CV NCC selaku kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas hanya melakukan penggilasan untuk pemadatan jalan di kawasan itu satu kali dan hasilnya tidak membuat kondisi jalan lebih baik. Begitu juga delapan unit jembatan juga tidak dikerjakan, termasuk 21 titik gorong-gorong yang harus diganti, hanya satu lokasi saja dilakukan perbaikan.

“Akibat pengerjaan asal jadi dan tanpa adanya penimbunan pada lokasi seharusnya ditimbun, akhirnya bila datang musim hujan tidak hanya berlumpur dan licin, tapi juga bahkan banjir menggenangi badan jalan,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ahmad Rukita, 28 tahun, salah seorang warga Dusun Pulau Gading, jika pihaknya sangat mengharapkan jalan itu menjadi baik, karena warga setempat selama ini sangat dirugikan dengan kondisi jalan jelek seperti sekarang.

“Contohnya saja kami yang sebagian besar sebagai petani karet, sejak dulu selalu dirugikan, terutama masalah harga jual. Biasanya harga di pasaran Rp 12 ribu per kilogram, sementara warga menjual kepada pengepul hanya Rp 8.000 per kilogram, akibat susah diangkut keluar dan itu pun harus merogoh kocek buat ongkos angkut Rp 120 ribu per 100 kilogram getah karet,” katanya.

Proyek DPPID yang dikerjakan sejak Nopember 2011 dan dijadwal berakhir Desember 2012 itu, diduga gagal. Bahkan

kini dicurigai telah terjadi penyimpangan, dimana kasus tersebut telah dilaporkan LSM Gerakan Anak Bangsa Peduli (GABP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Syaiful Iskandar, Direktur LSM GABP, dalam laporannya pada 27 Mei 2012 ke KPK antara lain mengemukakan telah terjadi keterlambatan pekerjaan dan pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi.

Runtunannya, menurut Syaiful, pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2011 mendapat kucuran dana DPPID sebanyak Rp 36,586 miliar dari dana APBN, dengan realisasi Rp 26,803 miliar untuk dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Pendidikan.

Khusus pekerjaan bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kata dia, dana dialokasikan untuk pengerjaan infrastruktur bidang transmigrasi, yaitu bagi peningkatan jalan dan jembatan, di kawasan jalur dari kilometer 20 Desa Taman Bandung dengan alokasi dana sebesar Rp 16,520 miliar.

Sementara infratraktur bidang lain, tambah dia, seperti peningkatan jalan dua jalur dalam Kota Sarolangun dari depan Sekolah Menengah Atas (SMA) I Sarolangun–Desa Bernai–Sungaiabang, senilai Rp 10,282 miliar lebih.

Khusus paket pekerjaan peningkatan jalan dan jembatan kawasan transmigrasi Spintun–Desa Taman Bandung, kata Syaiful, pelaksana proyek adalah PT Waskita Karya dengan surat perjanjian kerja nomor 118/Kont/BM-PNK/DPU&PERA/APBD-P/2011, 18 Nopember 2011 dengan besaran kontrak Rp 24,134 miliar. Masa pekerjaan proyek tersebut selama 40 hari, mulai 18 Nopember hingga 27 Desember 2011 dengan masa pemeliharaan selama 180 hari.

Proses pengerjaan proyek ini sudah dua kali mengalami

perubahan. Perubahan terakhir dengan ambendemen nomor 01/AMD/KONT/BN-PNK/DPU&PERA/APBD-P/2011 tanggal 19 Desember 2011 menyangkut perubahan nilai kontrak dari Rp 24.134 miliar menjadi Rp 16.520 miliar.

Pekerjaan dinyatakan selesai tuntas dan pembayaran Rp 16,520 miliar juga sudah dicairkan seluruhnya melalui surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 5180/03.01/LS/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Proyek ini sendiri selain melakukan pengerasan jalan sepanjang 17.500 meter juga menggantikan delapan unit jembatan terbuat dari kayu menjadi jembatan rangka besi baja, serta membuat gorong-gorong. Tapi yang dilakukan, menurut Abdul Azis, hanya melakukan pengerasan asal jadi dan penggantian satu titik gorong-gorong saja.

Bupati Sarolangun Cek Endra, ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat menyatakan bahwa pihak yang berkompeten untuk memberi konfirmasi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun. "Tolong hubungi langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum, karena saya sedang menjalani umroh," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun Fauzi beberapa kali dicoba dihubungi dinyatakan tidak berada di tempat. Koran ini mencoba menghubungi dia melalui dua nomor telpon genggamnya tetapi tidak satu pun yang aktif.

Seorang kepala cabang PT Waskita Karya menyatakan jika dirinya bukan siapa-siapa di perusahaan tersebut. "Saya bukan siapa-siapa di Waskita Karya, saya hanya keroco dan satpam saja. Silakan anda konfirmasi saja ke pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarolangun," katanya.



YOSE HENDRA, saat ini adalah wartawan *Media Indonesia* dan juga freelance untuk beberapa media seperti www.lingkarberita.com, www.padangkini.com, majalah kebencanaan *Sandereh*. Di samping itu juga menjadi freelance videography, dokumentaries dan freelance photography.

Sejak tiga tahun terakhir, pria kelahiran 26 September pada 27 tahun lalu ini juga beraktivitas di lembaga swadaya masyarakat dengan bergabung di Yayasan Idep. Pernah memenangi Kompetisi Rumah Aman Gempa untuk kategori Multimedia Non Formal tahun 2010 dengan judul

'Memasyarakatkan Rumah Aman Gempa di Indonesia.

Disela-sela kesibukan sebagai jurnalis, pria kelahiran Tanjungbarulak, Batipuh, Tanahdatar, Sumatra Barat ini juga menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang dan sedang studi S2 Program Ilmu Sejarah di Universitas Andalas, Padang. Ketertarikannya di bidang jurnalistik adalah menulis tentang budaya dan kemanusiaan.

IRONI DANA BANTUAN GEMPA

Oleh **Yose Hendra**

Dipublikasikan di *Padangkini.com*

Sejumlah agenda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat pasca gempa Padang tiga tahun silam nampaknya tidak berjalan sesuai rencana akibat lemahnya manajemen bencana serta adanya kebocoran alokasi dana bantuan.

Agenda-agenda tersebut, seperti Rencana Aksi Sumatera Barat pasca gempa 2009 yang berjalan tertatih; pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) melenceng dari jadwal semula 2009-2011; dan di sisi lain penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berjalan tidak optimal.

Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pertanggungjawaban bantuan gempa anggaran 2010, dana BLM yang ada di rekening delapan kelompok masyarakat (Pokmas) Kabupaten Padang Pariaman, yang nilainya mencapai Rp2,1 miliar, diblokir.

BLM adalah sistem pendistribusian dana stimulan untuk perbaikan rumah penduduk yang rusak akibat gempa 2009. Sumber dana berasal dari APBN dan APBD.

BPK juga menemukan dana BLM yang seyogyanya harus disalurkan cepat malah mengendap Rp744 juta lebih di rekening Pokmas. Ironisnya, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Sumatera Barat melansir ada 10 ribu korban gempa yang belum menjadi bagian penerima dana gempa karena tidak masuk daftar Rencana Aksi.

Salah satu yang tidak masuk dalam Rencana Aksi adalah Em Arif, 65, warga Koto Buruak, Nagari Lubuk Aluang, Kabupaten Padangpariaman. Sudah hampir tiga tahun ia mendiami rumah dengan retak di seujur konstruksi dan posisi miring hampir 45 derajat. Trauma yang masih membekas memaksa Em Arif membikin pondok berukuran 2 x 3 meter di belakang dapur untuk dijadikan tempat tidur.

Em Arif mengaku pernah didata fasilitator dibantu wali korong sebagai korban gempa dan dimasukkan pada kategori rumah rusak berat. Tapi sejalan dengan perputaran waktu, kepastian cairnya bantuan hingga sekarang tak pernah menyapa.

Terkait hal ini, Wali Korong Koto Buruak Hilir, Rio mengatakan, korban gempa di wilayahnya pernah didata pada akhir 2009. Untuk korban rumah rusak berat petugas dari provinsi memberi tanda dengan menempelkan stiker berwarna merah di dinding rumah.

“Mei 2012 sinyal bantuan untuk korban kembali mencuat, ada 400 kepala keluarga yang terdata. Para korban telah diisyaratkan oleh pihak PJOK Kabupaten Padangpariaman mendapat bantuan tahap empat,” katanya.

Menanggapi persoalan ini, Kepala Rehab Rekon BPBD Padang Pariaman Asriadi mengatakan, pendataan awal dilakukan Satkorklak (Satuan Tugas Koordinasi dan Pelaksana) karena BPBD belum terbentuk. Sumber data dari Satkorklak lalu disampaikan ke Pusat

“Kita sedang mengusulkan apakah kelebihan dana dari Renaksi (rencana aksi) boleh dialokasikan untuk nama-nama

korban yang tidak masuk Renaksi,” kata Kepala Rehab Rekon BPBD Sumbar Oktavianus, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, dana Renaksi tidak sepenuhnya tersalurkan karena data korban terus berkembang.

“Sisanya mungkin dari sisi verifikasi, bisa karena orangnya tidak ditemukan di lapangan, juga karena tak sesuai dengan nama dan alamat dan kadang dari rusak sedang menjadi rusak berat,” ujarnya.

Di samping itu, Oktavianus tidak menampik banyak terjadi permainan dalam pencairan dana stimulus tersebut. Oknum yang terlibat kebanyakan adalah fasilitator dan Pokmas.

“Dua orang fasilitator sedang diperiksa oleh kejaksaan karena diduga ‘nakal’ di lapangan,” katanya.

Banyak pihak menyayangkan fasilitator sebagai ujung tombak rehab rekon sebenarnya telah diberi honorium yang sewajarnya. “Selain gaji yang wajar, mereka juga kita bekali dengan pelatihan dan pemahaman untuk kerja mereka di lapangan,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Yohanes Wempi merasa khawatir bantuan gempa menjadi bom waktu konflik sosial.

“Wali Nagari yang mengadakan pertemuan dengan kami khawatir karena mendengar dari anggota DPR bahwa setelah tahap tiga selesai tak ada lagi bantuan gempa. Di sisi lain korban yang belum masuk Renaksi merasa berhak mendapat bantuan,” katanya.

Untuk sementara, sambung Yohanes, DPRD akan menyurati Bupati untuk melakukan *up date* pendanaan dan sama-sama memperjuangkan ke pusat agar bantuan gempa berikutnya ada.

MEKANISME ANGGARAN RENAKSI

Mekanisme Renaksi dari 2009 hingga 2011 yang dibuat sebaik mungkin nyatanya tetap ada perubahan format di tengah jalan. Untuk anggaran Renaksi ini, BNPB melalui dana DIPA telah mencairkan bantuan secara bertahap sepanjang 2009 hingga 2011, dengan rincian: Rp 313,9 miliar pada 2009, sementara pada 2010 dana mencapai Rp2,052 triliun, dan Rp300 miliar pada tahun lalu.

Mekanismenya, dana dari APBN tersebut ditransfer ke rekening khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sehingga menjadi APBD provinsi pada tahun berikutnya. Misalnya, dana yang bersumber dari APBN 2009, maka akan menjadi APBD tahun 2010.

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan empat sektor, yakni sektor perumahan, sektor infrastruktur dan gedung pemerintah/ lintas sektor, sektor sosial dan sektor ekonomi produktif, serta kegiatan pendampingan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan operasional institusi.

Seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap I dalam pelaksanaannya dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Pada Oktober 2010, pelaksanaan rehabilitasi dan dikategorikan sebagai tahap II. Prioritasnya adalah di sektor perumahan dengan anggaran Rp2 triliun untuk 137.000 unit rumah. Rinciannya 85.258 unit rumah rusak berat dan 51.743 unit rumah rusak sedang di 10 kabupaten dan kota, serta kegiatan pendampingan.

Memasuki tahap kedua, prosedur pencairan dana berbeda dengan yang dilaksanakan pada Tahap pertama, dana langsung dikelola Kuasa Pemegang Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BNPB melalui DIPA BNPB

tahun 2010.

Bantuan terdiri dua, yakni BLM dan Non Bantuan Langsung Masyarakat. BLM untuk perbaikan rumah ditransfer langsung ke rekening Pokmas dari KPPN Jakarta. Sedangkan biaya pendampingan yang merupakan dana non bantuan langsung masyarakat dialokasikan pada PPK RR provinsi dan dibantu PJOK.

Selanjutnya pada tahap ketiga, dana 300 miliar dari BNPB dicairkan 6 Juli 2011 untuk pelaksanaan kegiatan RR pascabencana tahun anggaran 2011. Senilai Rp 266,6 miliar dari dana tersebut diperuntukan bagi 11.351 unit rumah rusak berat dan 9.633 rusak sedang. Sisanya, Rp 33,4 miliar diperuntukan bagi pendampingan bantuan langsung.

Hingga semester pertama 2011, capaian yang sudah dibangun pemerintah dalam rehab rekon 171.756 unit rumah sudah dibangun.

Meski mekanisme dibuat sedemikian rupa, nyatanya aplikasi tetap lemah. Permasalahan justru banyak terjadi dalam tataran penyaluran.

Seperti laporan BPK, banyak dana mengendap dan tak bisa didistribusikan sesuai dengan Renaksi. Disinyalir penyebabnya karena yang mengurus kurang profesional dan ada indikasi permainan di lapangan.

Untuk tingkat pengurusan, terjadinya pergantian pejabat antar waktu sebelum pencairan tuntas menjadi sinyalemen buruknya pola penanganan Renaksi.

Terkait hal ini, Oktavianus mengatakan, BNPB telah mengimbau kalau pejabat yang sedang melaksanakan kebencanaan jangan ditukar karena dampaknya data bisa hilang. "Tapi kadang bupati butuh dan dia punya hak prerogatif," katanya.

Direktur Eksekutif LSM Limbubu Nurhayati Kahar melihat dalam institusi BPBD antara kepala dan sekretaris tidak sejalan. Semuanya dibawakan pada kepentingan politik.

“Soal anggaran gempa, penyimpangan yang kecil-kecil menjadikan kepala korong sebagai korban, sementara yang melakukan penyimpangan bernilai miliaran rupiah aman-aman saja, temuan yang didapat BPK harus diproses oleh aparat hukum,” tukasnya.

SUNAT DATA DAN DANA

Sebelum dana dicairkan, data adalah keharusan. Tapi pendataan yang dilakukan saat masa tanggap darurat, akurasi sering diabaikan. Akibatnya, hal itu menjadi sumber masalah.

Misalnya validasi data. Saat tanggap darurat, acuan data berasal dari Satkorlak, sehingga itu menjadi pegangan dalam Renaksi. Namun yang menjadi juru kemudi Renaksi bukanlah Satkorlak, melainkan BPBD yang mulai berdiri 2010. Akibatnya, BPBD sering dihadapkan pada persoalan data setiap mencairkan bantuan stimulan.

Banyak warga yang telah masuk pendataan oleh Satkorlak nyatanya tak kunjung diberi bantuan. Akibatnya, fasilitator sering ‘ditodong’ oleh warga saat bekerja di lapangan. Mulai dari sekedar menanyakan hingga melakukan aksi unjuk rasa.

Dalam proses rehab rekon gempa 2009 ini, pendataan dilakukan dua bulan pasca kejadian. Pendataan dilakukan Satkorlak yang terdiri dari BNPB, BPBD, perguruan tinggi dan berbagai relawan lainnya. Data korban dan kerusakan dari Satkorlak ini kemudian menjadi acuan Renaksi.

Menurut Oktavianus, pendataan hanya menghabiskan waktu tiga minggu. Sebab APBN 2009 menjadi target untuk dana Renaksi tahap pertama di ambang tutup buku.

Namun, pendataan serba cepat seperti mengejar target menimbulkan prahara di kemudian hari. Ada korban yang sudah didata, tapi tak pernah diproses bantuan untuk mereka, ada juga data ganda, data tumpang tindih, dan bahkan juga muncul data fiktif.

Asriadi mengaku, memang ada masyarakat yang luput dari pendataan dengan alasan rumah jauh dan tidak terjangkau, rumahnya lebih dari satu, dan rumah yang ditinggal pemilik.

Sementara, Yohanes Wempi menyebutkan, ada indikasi korban yang tidak masuk Renaksi karena ada data ganda, ada yang semestinya tidak dapat tapi dapat, ada dana tumpang tindih, ada kelompok yang tidak dapat padahal sudah masuk korban.

Menurutnya, human error tidak bisa dijadikan satu-satunya kambing hitam dalam persoalan pendataan karena margin errornya mencapai 2,5 persen. Kita, tambahnya mendapat laporan, ada pemotongan Rp50 ribu untuk tiap bantuan yang telah dicairkan.

“Karena data itu tidak jelas, kesimpulannya pun tidak kongkret, isu yang berat saat ini, kalau bantuan gempa tidak tuntas akan jadi konflik sosial besar,” kata Yohanes.

Selain terjadinya sunat data dan dana secara masif, BPK menemukan banyak indikasi penyimpangan dalam pengengjewanahan BLM senilai Rp1,7 triliun di Sumbar.

Di Kabupaten Agam terdapat indikasi dana bantuan yang tidak tersalurkan sebesar Rp250 juta. Pemanfaatan uang lauk pauk sebesar Rp9,9 juta di Sumatera Barat juga tidak sesuai dengan tujuan pemberi bantuan.

Temuan lainnya antara lain, ada kelebihan kepada rekanan sebesar Rp2,4 juta dalam pekerjaan rehab rekon. Sisa dana BLM sebesar Rp 745 juta mengendap di rekening Pokmas. Dan dana

BLM sebesar Rp2,1 miliar diblokir di 8 Pokmas di Kabupaten Padang Pariaman.

“Saya sendiri berani mengambil tindakan pemblokiran jika dana tersebut disalahgunakan, banyak yang memberikan dana stimulan untuk membeli motor, tapi yang kena tetap daerah,” ujar Asriadi memberi alasan.

Pagu anggaran Kementerian/ Lembaga yang dijadikan BLM untuk Padang Pariaman sendiri, mencapai Rp729 miliar yang disalurkan kepada 2.232 Pokmas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan dana bantuan pasca bencana 2010 yang meliputi proses perencanaan, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, sebagian tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita terkendala dengan pola pikir masyarakat yang notabene egois dan juga lemahnya SDM yang terlibat dalam rehab rekon,” kata Asriadi.

Menyoroti lemahnya SDM dari aparaturnya pemerintah ini, dikatakan Nurhayati Kahar, membuat fasilitator merajalela. “Kebanyakan fasilitator memotong bantuan, saya lebih setuju wali korong diberi saja Rp100 ribu dalam tiap bantuan yang dicairkan,” ujarnya.

“Ada korban gempa yang ketika akan mendapatkan haknya dipotong oleh fasilitator antara Rp50 ribu hingga Rp500 ribu, kadang Pokmas juga melakukan pemotongan, modusnya kadang imbalan jasa pembuatan RAB, dan kadang uang lelah,” kata Nurhayati.

Meski begitu, permasalahan yang terjadi dalam rehab rekon Sumbar telah melanggar banyak perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2010.

BERHARAP PADA APBD

Jika sisa dana bantuan stimulan dalam Renaksi tidak bisa diperuntukan bagi korban di luar Renaksi yang berjumlah 10 ribu jiwa, BPBD Sumbar mengisyaratkan akan mengusahakannya dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara bertahap.

Namun untuk saat ini, jelas Oktavianus, dana yang bersisa dikumpulkan dulu, dan setelah itu diusulkan ke BNPB. Kalau gagal, usaha kita adalah merapatkannya dengan provinsi dan kabupaten/ kota yang bersangkutan agar bisa ditanggulangi BPBD," tuturnya.

Sebelumnya, tambahnya, orang BNPB pernah mengatakan kalau bisa ditutup saja bantuan gempa 2009 karena banyak bencana lain. Sebab itu, APBD diharapkan bisa menanggulangnya.



EKO WIDIANTO, lahir di Malang 5 April 1978. Memulai karir jurnalistik di Radio MAS FM Malang tahun 2002. Tamat pendidikan SI di Sekolah Tinggi Teknologi Industri 2006.

Mengikuti berbagai pelatihan jurnalistik radio yang diselenggarakan Internews Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Kantor Berita Radio 68H. Sejak 2008 menjadi koresponden Tempo News Room. Tertarik menulis berita berbagai isu lingkungan dan

korupsi. Mengikuti berbagai workshop penulisan berita investigative reporting korupsi yang diselenggarakan PPMN dan AJI.

KORUPSI JAMKESDA: RS TOLAK PASIEN CUCI DARAH

Oleh **Eko Widiyanto**

Dipublikasikan di *Tempo.co*

Zulaikah terbaring tak sadarkan diri setelah Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Malang, menghentikan layanan cuci darah untuknya. Perempuan 38 tahun itu gagal melakukan cuci darah karena pemerintah Kabupaten Malang menunggak tagihan pembayaran untuk pasien miskin pemegang layanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) seperti dirinya.

“Dia langsung *drop*, beberapa kali layanan cuci darah dihentikan,” kata Liana, ibunda Zulaikah, Selasa, 31 Juli 2012. “Jika tak menjalani cuci darah, Zulaikah mengalami sesak napas, nafsu makan turun, dan selalu mengeluh sakit di punggungnya. Setiap pekan, ia harus menjalani cuci darah.”

Zulaikah adalah satu dari ribuan pasien yang gagal menjalani perawatan medis murah di Kabupaten Malang, Jawa Timur, karena pemerintah setempat menunggak pembayaran kepada rumah sakit. Sejak dua pekan lalu penderita gagal ginjal cemas setelah RSSA Malang menolak pasien pemegang surat pernyataan miskin (SPM).

Manajemen rumah sakit tersebut menghentikan pelayanan kepada warga Kabupaten Malang yang dirujuk melalui Jamkesda dan SPM karena pemerintah Kabupaten Malang

menunggak biaya perawatan hingga Rp 11,8 miliar. “Pelayanan dibuka setelah utang dibayar,” kata Direktur RSSA Malang Basuki Bambang Purnomo.

Data yang diperoleh Tempo menunjukkan pemerintah setempat hanya membayar Rp 21 miliar dari total tagihan sebesar Rp 26 miliar tahun 2011. Pada tahun ini Pemkab Malang hanya membayar Rp 7,7 miliar dari total tagihan Rp 14,5 miliar. Menurut data tersebut, kasus serupa juga terjadi di enam kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Koordinator Jaringan Kerja Anti-Korupsi (JKAK) Jawa Timur Luthfi Jayadi Kurniawan menilai pemerintah gagal memenuhi hak dasar sektor kesehatan warganya. Dia menambahkan pemerintah dianggap tak memiliki skema penyusunan anggaran secara berjenjang yang meliputi; program Jamkesmas menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Jamkesda yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, serta SPM dari APBD kabupaten dan kota.

“Penyusunan anggaran amburadul,” kata dia. Akibatnya, hingga pertengahan tahun seluruh dana Jamkesda dan SPM habis. Seharusnya pemerintah menyusun indeks kebutuhan masyarakat yang dihitung berdasarkan potensi penggunaan dana pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Selain itu, JKAK mencium aroma korupsi dalam penggunaan anggaran tersebut. Luthfi menduga korupsi terjadi di rumah sakit penerima Jamkesda dan SPM, serta dinas Kesehatan yang mengeluarkan SPM. Modus operandinya, kata dia, rumah sakit menggelembungkan tagihan biaya perawatan pasien Jamkesda dan pemegang SPM.

“Penggelembungan tagihan bisa berselingkuh dengan dinas kesehatan,” kata Luthfi. Sementara inspektorat jarang

melakukan pengawasan secara mendetail dan masyarakat tak bisa mengontrol langsung proses tersebut. Untuk itu, dia mendesak agar pengawasan penggunaan anggaran diperketat.

Bupati Malang Rendra Kresna menginstruksikan dibentuk tim investigasi untuk mengusut penyalahgunaan dana tersebut. Dia mencurigai terjadi kebocoran penggunaan dana Jamkesda dan SPM. "Harus diusut. Jangan bobol lagi, penerima SPM harus diseleksi," ujarnya.

Rendra menemukan fakta banyak pasien yang secara ekonomi mampu, namun mereka pura-pura miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis. Bahkan pengajuan SPM dilakukan oleh calo. "Jika ada pelanggaran, harus ditindak," tegas Rendra.

Rendra mengatakan dari total 641 ribu peserta Jamkesmas, total klaim pembayaran biaya pengobatan sebesar Rp 3,5 miliar. Sementara dari peserta SPM sebanyak 4.100, total tunggakan mencapai Rp 7,8 miliar. Mekanisme untuk mengeluarkan SPM pun diperketat. Pemerintah Kabupaten Malang menurunkan bidan desa untuk ikut mengawasi ke lapangan.

Di tempat lain, hal serupa dialami Galih Arabi (17) yang tertunduk lesu menunggu pelayanan cuci darah di Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen. Dia terpaksa harus cuci darah setelah penyakit kronis menggerogoti kesehatan ginjalnya.

Galih, yang putus sekolah di sekolah menengah kejuruan Blitar, mengharapkan tidak bernasib sama seperti Zulaikha. Menurut dia, dana jaminan kesehatan dari pemerintah tersebut tidak hanya menjadi tumpuan hidup bagi dirinya sendiri tapi juga bagi warga lainnya di Jatiguwi, Sumberpucung. "Kalau tak bisa cuci darah, nyawa saya bisa melayang," katanya lemah.



SRI WAHYUNIK, terlahir di Banyuwangi, 10 Juli 1979 dan diberi nama Sri Wahyunik. Saat ini bertempat tinggal di Jember, Jawa Timur. Mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SDN 3 Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, kemudian SMPN Purwoharjo, lalu menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 1 Jember.

Menempuh studi strata I di Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Jember. Semenjak wisuda di tahun 2005 hingga

kini, menjadi koresponden Harian *Surya* untuk wilayah Jember. Tertarik pada liputan apapun mulai ekonomi hingga lingkungan.

ORANG SAKIT SUMBANG PAD TERTINGGI DI JEMBER

Oleh **Sri Wahyunik**
Dipublikasikan di *Surya Online*

Orang sakit di Kabupaten Jember menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 92,7 miliar pada 2011 atau hampir separuh dari total *income* daerah tersebut. Total PAD Jember tahun lalu mencapai 200 miliar rupiah yang sebagian besar diraih dari pembayaran jasa kesehatan dari orang-orang miskin di beberapa rumah sakit dan Puskesmas di daerah tersebut dan sisanya dari retribusi dan pariwisata.

Pendapatan dari jasa kesehatan tersebut didapat dari RSD dr Soebandi Jember yang mencapai Rp 70 miliar dan sisanya didapatkan dari RSUD Kalisat, RSUD Balung dan 49 Puskesmas se Jember. Pendapatan RSD dr Soebandi sendiri naik signifikan dibandingkan tahun 2010 yang hanya mencapai Rp 58 miliar.

“Alhamdulillah melebihi target. Ada kelebihan pendapatan sekitar Rp 800 juta,” ujar Direktur RSD dr Soebandi Jember dr Yuni Ermita. Pendapatan di RSD dr Soebandi Jember terdiri dari pendapatan pasien umum, pendapatan obat, ambulans, Askes, Jamkesmas dan Jamkesda/SPM.

Menurut Yuni, rumah sakitnya memperoleh pendapatan dari pasien umum sebesar Rp 19,5 miliar, sementara pendapatan penjualan obat mencapai Rp 14,5 miliar, sedangkan dari jasa

ambulans sebesar Rp 590 juta, dan kemudian dari klaim asuransi Askes mencapai Rp 17,7 miliar. Selain itu, kata dia, pendapatan dari Jamkesmas mencapai Rp 15,9 miliar, sedangkan dari Jamkesda atau pasien yang menggunakan surat pernyataan miskin atau Jamkesmas non kuota mencapai Rp 2.5 miliar.

Yuni menambahkan pendapatan dari Askes melebihi Rp 17 miliar atau kelebihan empat miliar rupiah dari target semula. Lebih lanjut Yuni berjanji akan semakin memperbaiki pelayanan di rumah sakit, sehingga warga makin percaya untuk mengobati dirinya ke rumah sakit daerah tersebut.

Sementara itu, rincian jumlah kunjungan pasien ke RSD dr Soebandi di tahun 2011 terdiri dari pasien umum mencapai 60.925 orang, pasien Askes mencapai 61.174 orang serta pasien Jamkesmas dan Jamkesda mencapai 30.073 orang. Totalnya ada kunjungan sebanyak 152.172 orang dalam setahun ke rumah sakit itu.

KONTRIBUSI PASIEN GINJAL

Kunjungan pasien umum harus diakui memang menjadi penyumbang PAD bagi pemerintah kabupaten selaku pemilik aset RSD dr Soebandi. Salah satu penyumbang PAD dari orang sakit adalah H Ahmad, warga Kelurahan/Kecamatan Sumbersari yang setiap lima hari sekali harus merogoh kocek untuk biaya cuci darah istrinya. Istrinya melakukan cuci darah di Unit Hemodialisa RSD dr Soebandi.

Setiap kali cuci darah, ia harus mengeluarkan uang Rp 600.000. "Setiap lima hari sekali cuci darah, sebagai pasien umum tarifnya Rp 600.000 setiap cuci darah," kata Ahmad.

Itu hanya untuk satu orang pasien. Padahal di unit tersebut, untuk dua bulan saja di bulan Januari dan Februari lalu saja merawat 350 pasien gagal ginjal yang menjalani cuci darah.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Jember yang membidangi pendapatan M Asir membenarkan kalau PAD Jember masih berharap banyak dari orang sakit. Pendapatan dari orang sakit ini disetujui dalam perencanaan penganggaran.

“Memang harus diakui, orang sakit menyumbang yang paling tinggi untuk tahun 2011 lalu. Itu bisa dilihat dari pendapatan rumah sakit,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Akan tetapi pola itu akan dirubah untuk tahun 2012 ini. Menurut dia, tahun ini target PAD sebesar Rp 210 miliar. Pendapatan akan didongkrak dari sektor lain terutama pajak dan retribusi daerah, kata dia.

“Apalagi *kan* ada sejumlah aturan baru kalau pajak dipungut daerah. Saya kira itu nanti akan menggantikan PAD dari orang sakit,” imbuh Asir.

Namun ia tidak bisa menyebutkan berapa prosentase PAD yang akan didapatkan dari orang sakit serta pajak dan retribusi tersebut karena anggaran tahun 2012 masih berjalan.

Melihat jumlah dan angka tersebut setidaknya membenarkan pernyataan anggota Komisi IX DPR RI, Subagyo Parto diharjo kalau jumlah orang sakit di Jember tinggi. Karenanya, ia menyarankan agar tindakan pencegahan (preventif) lebih diutamakan daripada membiayai warga yang jatuh sakit karena lebih mahal.

“Anggaran kesehatan yang *pro-poor* (warga miskin) itu adalah yang menyentuh langsung kepada masyarakat, itu bisa di tingkat kesehatan dasar dan dini. Salah satunya di tingkatan preventif. Jika itu dilakukan, maka kualitas kesehatan orang Jember akan bagus,” tegas Subagyo.

Sayangnya anggaran kesehatan untuk program pencegahan tersebut tidak tinggi jika dibandingkan sektor lain, akan tetapi di sisi lain, orang sakit masih menjadi cara paling gampang di Jember untuk meraup PAD.



ANANG ZAKARIA, lahir di Gresik, 10 Juni 1981, menempuh pendidikan terakhir di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang. Lulus pada 2007, mulai bergelut di dunia jurnalistik sebagai wartawan di *Radar Bromo* (Jawa Pos Group) pada tahun itu juga. Setahun kemudian, pindah ke *Nusa Bali* dan *Warta Bali*, sebuah surat kabar harian di Denpasar, Bali.

Pertengahan tahun 2008 mulai bergabung dengan *Tempo*. Setengah tahun menjalani profesi sebagai koresponden *Tempo* di Bali, awal 2009 pindah bertugas di Surabaya, Jawa Timur. Tahun 2010 kembali pindah sebagai koresponden untuk wilayah eks-Karesidenan Kedu, Jawa Tengah. Hingga akhirnya, paska erupsi Merapi Oktober 2010 pindah ke wilayah Yogyakarta. Kini, dengan wilayah liputan Yogyakarta dan sekitarnya, memilih tinggal di Jogokaryan MJ III nomor 739A kota Yogyakarta.

Sejumlah pelatihan yang pernah diikuti di antaranya pelatihan Serikat Pekerja bagi Pers yang digelar AJI Indonesia di Jakarta pada 2009, Conflict Sensitive Journalism I yang digelar Peace and Conflict Journalism Network di Yogyakarta pada 2011 dan Penguatan Kapasitas Jurnalis untuk Transparansi Anggaran yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen di Yogyakarta pada 2012.

Saat ini, tercatat sebagai pengurus Divisi Serikat Pekerja Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta, juga bekerja sebagai penulis lepas di *lingkarberita.com*, sebuah situs sindikasi berita berpusat di Jakarta.

“MAK, KAPAN AKU SEKOLAH?”

Oleh **Anang Zakaria**

Dipublikasikan di *Lingkarberita.com*

Bagi banyak orang, pertanyaan itu mungkin terdengar biasa. Tapi tidak bagi Yayuk, bukan nama sebenarnya, warga Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Perempuan itu tak bisa memastikan kapan anak semata wayang yang hidup dengan HIV itu bisa kembali bersekolah.

Lidah perempuan 27 tahun itu mendadak kelu tiap kali anak semata wayangnya, sebut saja bernama Budi, datang mencecar. Tak ada lagi jawaban yang mampu diberikan. “(Tapi) ia tetap nanya,” katanya, Rabu (25/7).

Budi adalah siswa Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Athfal di Desa Ngoro-Oro, tetangga Desa Nglanggeran. Terdaftar sebagai siswa sejak Juni lalu, Budi belum bisa masuk sekolah. Wali murid di TK itu menolaknya, lantaran di tubuh bocah berusia 5 tahun itu bersarang *Human Immunodeficiency Virus* atau HIV. Para orang tua khawatir virus perontok kekebalan tubuh tersebut menular ke anak mereka.

Ditemui di Balai Desa Ngoro-Oro, Yayuk duduk tertegun di kursi di sudut ruangan. Matanya berkaca-kaca. Ia sedih. Hari itu, mediasi wali murid dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Komisi Penanggulangan AIDS, dan sejumlah

lembaga swadaya masyarakat, tak mampu mengembalikan Budi ke sekolah. “Saya kecewa,” kata Yayuk singkat.

HIV ketahuan bercokol di tubuh Budi pada 2008. Kala itu, Budi yang baru berusia 11 bulan menderita diare. Usaha mencari kesembuhan untuk Budi membawa Yayuk ke Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Di Rumah Sakit itulah, Budi dinyatakan positif mengidap HIV. Belakangan tak hanya Budi, Yayuk dan Gatot (bukan nama sebenarnya), suaminya, diketahui bersarang virus yang sama.

Patuk adalah satu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul. Dengan luas 7.203 hektare, kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul. Dari pusat kota Yogyakarta, Patuk bisa dicapai setelah menempuh perjalanan setengah jam dengan kendaraan bermotor.

Situs resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merilis Kecamatan ini dihuni 33.768 jiwa, terhimpun dalam 8.787 kepala keluarga, pada 2008. Sebanyak 2.944 keluarga di antaranya masuk kategori miskin. Sebagian besar penduduk Patuk bermata-pencaharian petani, berikutnya berdagang.

Tak terkecuali Gatot. Sembari sesekali bekerja serabutan, sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani. Adapun Yayuk memilih membuka warung kecil tak jauh dari Kawasan Ekowisata Gunung Api Purba Nglanggeran. “Jualan rokok, minuman, dan pulsa,” katanya.

Kepala Sekolah TK, Suratmi, mengatakan tak pernah menolak Budi bersekolah. Pengetahuan masyarakat terhadap HIV/AIDS dinilainya masih rendah. Mereka beranggapan penyakit ini menular dengan hanya bersentuhan tangan. Persepsi inilah yang kemudian memicu wali murid beramai-ramai menolak Budi di sekolah.

“Ada yang datang langsung ke sekolah sampai telepon dan

kirim SMS ke HP saya,” kata Suratmi. Tujuannya, sambung dia, nyaris sama. Jika penolakan tak digubris, mereka mengancam mengeluarkan anaknya dari sekolah.

Pihak sekolah sebenarnya telah mencoba memberikan pemahaman pada para orang tua. Namun, anggapan HIV/AIDS adalah penyakit mematikan yang tak disembuhkan terlampau kuat melekat di benak mereka. Hasilnya, “Mereka tetap saja ragu,” katanya.

Tak berhasil mempertahankan Budi di dalam kelas, pengelola TK mencari cara lain. Suratmi mengaku bersama 10 pengajar lain telah bersepakat mengajar Budi di rumah, alias *home schooling*. Tapi tawaran itu ditolak orang tua Budi.

Kini, Budi sudah bisa menulis namanya sendiri. Ia pun telah mampu berhitung hingga angka 10. Yayuk ingin anaknya punya kemampuan lebih dari itu. Namun dia berpendapat *home schooling* adalah diskriminasi. “Kalau siswa lain bisa duduk di kelas, kenapa Budi tidak?”

Yayuk belum tahu kemana akan membawa Budi bersekolah. Belum juga ada rencana. Untuk sementara, setiap kali Budi bertanya, dia menemukan cara menjawab. “Sekolah *wis kebak* (sudah penuh, red).”

MINIM DUKUNGAN

Bukan tanpa alasan mediasi digelar. Terus menerus menjadi sorotan media massa, kasus ini membuat pejabat pemerintah Gunungkidul meradang. Apalagi dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-181 Kabupaten Bantul, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X menegur Bupati Gunungkidul, Badingah.

“Karena itu kami melakukan sosialisasi,” kata Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi, usai mediasi dengan

warga. Penjelasan utuh soal HIV/AIDS dia paparkan di depan puluhan warga yang menyesaki Balai Desa.

Mengaku jarang bersalaman dengan perempuan, demi sosialisasi Immawan menyalami seorang perempuan penderita HIV/AIDS dari lembaga non-pemerintah peduli HIV/AIDS. Dia ingin memperlihatkan bahwa HIV/AIDS tak menular hanya dengan bersalaman apalagi bersentuhan.

Tapi, Immawan tak berkulit saat warga tetap menolak Budi bersekolah. "Warga tak bisa dipaksa." Aturan penerimaan siswa di sekolah tak bisa diutak-atik pula, hanya merujuk ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kewajiban pemerintah, kata Immawan, hanya sosialisasi.

Sayangnya, dukungan pun tak berlimpah. Anggaran sosialisasi HIV/AIDS, misalnya. APBD Kabupaten Gunungkidul hanya mengalokasikan Rp 4,5 juta untuk setahun. Bandingkan dengan pengadaan baju pegawai Dinas Kesehatan yang mendapat alokasi Rp 73 juta.

Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Dewi Irawati tak membantah anggaran sosialisasi tersebut terlalu kecil. Data terakhir, dilansir pada 2006, di wilayah ini tercatat 62 orang penderita HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 30 persen adalah ibu rumah tangga. Seks berisiko diduga masih menjadi penyebab peningkatan angka kasus ini, yang itu pun menurut Dewi masih berupa puncak gunung es.

Untuk mengungkap dasar "gunung es", sambung Dewi, dibutuhkan fasilitas pemeriksaan darah. Tapi sekarang baru ada satu klinik *Voluntary Consuler Testing*, berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

PELANGGARAN HAK ANAK

Kasus Budi, mendatangkan kecamatan beruntun. Pelanggaran

hak anak, masuk dalam daftar kecamatan itu. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, Samsudin Nurseha, mengatakan Bupati Gunungkidul harus bertanggungjawab. Yaitu dengan menjamin hak Budi untuk tetap bersekolah. Sebagai kepala daerah, Bupati dan wakilnya adalah penanggung jawab kebijakan tertinggi di suatu daerah.

Samsudin mengatakan ada banyak konvenan dilanggar pemerintah. Di antaranya UU 11/2005 dan UU 12/2005 tentang konvenan internasional hak ekonomi-sosial-budaya serta sipil-politik. Konvensi hak anak yang menjamin pendidikan tiap anak berlangsung tanpa diskriminasi apapun, yang telah diratifikasi Indonesia pada 2010, terlanggar pula. "Pemerintah melakukan pembiaran," katanya.

Tak seharusnya Budi berhenti belajar berhitung. Dan tak ada alasan membiarkan Budi lain mengalami perlakuan serupa.



FATKHURROHMAN TAUFIK, jurnalis berbasis di Surabaya.

Memulai aktivitas jurnalistik sejak tahun 2002 ketika menjadi reporter di Majalah Mahasiswa Ara-Aita IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak 2004 sampai sekarang menjadi koresponden di Kelompok Tempo Media.

Lahir di Trenggalek 10 April 1980, pernah mengenyam pendidikan di Pesantren salafiyah syafi'iyah, Darunnajah, Jalen, Ngrukem, Mlarak, Ponorogo mulai 1996-2000. Mendapat gelar sarjana sosial pada 2004.

Saat ini sedang menempuh program pascasarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Dr Soetomo Surabaya. Di sela-sela aktivitas jurnalistik juga menjadi pengurus Aliansi Jurnalis Independen Surabaya sejak 2004 hingga sekarang. Tertarik pada liputan kemanusiaan dan lingkungan.

PROGRAM RSBI DINILAI HANYA PEMBOROSAN ANGGARAN

Oleh **Fatkhurrohman Taufik**
Dipublikasikan di *Tempo.co*

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Sulistyanto Soejoso, menilai program rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) hanya pemborosan anggaran karena terbukti tidak bisa meningkatkan mutu sekolah. Ia mendesak program RSBI segera dihapuskan menyusul tak kunjung membaiknya sistem pendidikan di seluruh RSBI di Jawa Timur.

Sulistyanto mengatakan dana untuk membangun RSBI mencapai Rp 1 miliar di tiap sekolahnya. Tapi hingga saat ini, kata dia, tak ada satu pun sekolah-sekolah yang masuk program RSBI yang mampu lolos menjadi SBI.

Di kota Surabaya misalnya, dari delapan SMA Negeri dan dua SMA Swasta, serta tiga SMP negeri yang menjadi RSBI, ternyata juga tak ada yang lolos menjadi SBI. "Padahal, sekolah tersebut selama tiga tahun pertama berdirinya RSBI mendapatkan subsidi Rp 300-400 juta setiap tahunnya," kata Sulistyanto kepada Tempo, Selasa 30 Juli 2012.

Tak hanya itu, tiap-tiap siswa juga mendapatkan subsidi biaya sekolah per bulan mencapai Rp 70.500 (untuk tingkat SMP) dan Rp 152.000 (untuk tingkat SMA). Itu belum termasuk

dana dari pemerintah untuk menyekolahkan para guru dan dana untuk pengembangan sekolah lainnya.

Hasil kajian Dewan pendidikan selama lima tahun perjalanan RSBI, diketahui kualitas lulusan RSBI ternyata juga tak jauh beda dengan sekolah reguler. Padahal untuk masuk RSBI, tak jarang wali murid harus mengeluarkan biaya ekstra.

RSBI yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris, dinilai juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Ini sekolah di Indonesia, harusnya bahasa pengantar ya pake Indonesia,” ujarnya.

Apalagi, penyampaian bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di RSBI dinilai juga hanya menipu para siswa. Nayatanya guru-guru masih belepotan menyampaikan pelajaran dalam bahasa asing. Apalagi, kaidah bahasa Inggris untuk setiap program study juga berbeda-beda. “Bahasa Inggris untuk pelajaran fisika, biologi, kimia, agama, maupun bidang lainnya sangat berbeda yang ini tak banyak dikuasi oleh para guru di RSBI,” kata Sulistyanto.

Yang mengkhawatirkan, keberadaan RSBI hanya menjadikan jurang kesenjangan antar lembaga pendidikan. Padahal, hingga detik ini, belum ada ukuran pasti keberhasilan dari RSBI ini.

Problem ini, kata Sulistyanto, terjadi karena para guru di Indonesia sebenarnya telah mengalami perbedaan orientasi. Apalagi, dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen menjadikan banyak guru yang sekedar mencari formalitas untuk mengejar gaji yang diinginkan.

Di Jawa Timur misalnya, anggaran pendidikan dari APBD mencapai Rp 1,003 triliun dan ditambah Rp 2,82 triliun dari APBN untuk dana BOS. Melimpahnya dana inilah yang lantas dijadikan ladang bari para guru untuk mengejar pola sertifikasi

sehingga mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Ketidakjelasan pengelolaan anggaran, menjadikan Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, tahun ini memotong anggaran RSBI dari Rp 25 miliar menjadi Rp 16 miliar. Dana ini, akan digunakan sepenuhnya untuk menyekolahkan guru dari lulusan S1 menjadi S2.

“Biasanya, anggaranya mencapai Rp 25 miliar, kami melihat ini tidak efektif,” kata dia. Karena itu, mulai tahun ini, anggaran hanya difokuskan untuk menyekolahkan guru. Semengata untuk program lainya semisal perbaikan gedung dan sebagainya mulai dihentikan. Guru sengaja diprioritaskan karena salah satu prasyarat menjadi SBI seluruh guru haruslah lulusan S2.

Jika hingga tahun depan, RSBI di Jawa Timur tak ada satu pun yang meningkat menjadi SBI, DPRD Jawa Timur mendesak dilakukan evaluasi dan menutup beberapa RSBI yang tak sesuai dengan standart.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Harun, membantah RSBI hanya menghabiskan anggaran. Menurut dia, anggaran untuk pengembangan program RSBI dilaporkan secara berkala dan transparan. “Semua anggaran pendidikan itu transparan,” kata dia.

Dana sebesar Rp 1 miliar untuk RSBI dinilainya juga masih sangat kecil dibandingkan hasil yang selama ini diterima. Apalagi, keberandaan RSBI terbukti menjadikan sekolah-sekolah lainya termotivasi untuk menjadi lebih baik. Mengenai keberadaan RSBI ini, Harun mengaku Dinas Pendidikan masih akan mempertahankan selama tidak ada larangan bagi daerah untuk terus mengembangkan RSBI.



HENDRI DUNAN, lahir di Kampung Baru Jambi 5 Mei 1981, memulai karir sebagai jurnalis tahun 2006 di Harian *Jambi Ekspres* dan sejak 2010 bekerja di Koran *Tribun Jambi*. Sehari-hari, pria yang kini bermukim di kota Jambi ini bertugas di desk politik dan kriminal.

Ia juga aktif menulis puisi dan cerita pendek yang diterbitkan di sejumlah koran lokal, pernah memenangi lomba penulisan puisi dan salah satu karyanya juga tergabung dalam Antologi Puisi Negeri Nurani.

Sarjana Bahasa Indonesia Universitas Jambi dan Magister Pendidikan Islam ini pernah menjadi guru di sejumlah SMP dan SMA di Jambi. Ia juga pernah mengajar di STIE Graha Karya Batanghari dan IAIN STS Jambi, tahun 2007.

SDN SELEWENGKAN DANA BOS UNTUK GURU FIKTIF

Oleh **Hendri Dunan**

Dipublikasikan di *Tribun Jambi*

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 67/IV Telanaipura Kota Jambi mengalami kebocoran selama tiga tahun terakhir, kata para guru dan staf sekolah tersebut. Menurut mereka, dana BOS tersebut diselewengkan untuk membayar gaji staf honorer siluman.

“Bukti penerimaan ada, namun orangnya sendiri tidak pernah ada,” kata mereka.

Penyelewengan itu terungkap setelah salah satu guru dan staf sekolah tersebut menemukan berkas lampiran bukti penerimaan gaji honorer yang diambil dari dana BOS. Dalam lampiran tersebut tertera dua nama, Hera Syafana dan Rapika, yang tidak mereka kenal namun ikut menerima gaji seperti mereka.

Awalnya pihak sekolah tidak mengakui data itu saat Tribun menemui mereka di luar sekolah. Mereka mengaku takut untuk mengakui kebenaran data tersebut. Tetapi saat Tribun memperlihatkan bukti lampiran tersebut, barulah mereka mengakuinya.

“Kami terkejut, siapa dua nama itu. Padahal mereka tidak pernah ada di sekolah dan bekerja di sekolah. Lalu, kenapa ikut menerima gaji seperti kami,” ungkap staf tersebut, Senin

(30/7/12).

Dia mengatakan selama bekerja lama di SDN 67/IV Telanaipura Kota Jambi tersebut sampai saat ini tidak sekalipun melihat dua orang pemilik nama tersebut. Bahkan dirinya masih mengingat beberapa nama-nama tenaga honorer di sekolah tersebut.

Dua tenaga honorer fiktif yang dimaksudkan tertera jelas di daftar penerimaan gaji tenaga honorer SDN tersebut. Bahkan, dua tenaga honorer itu ikut membubuhi tandatangan dan menerima gaji sebesar Rp 200 ribu per bulan. Sedangkan bukti pembayaran gaji itu sendiri dibayarkan setiap tiga bulan dengan nominal Rp 600 ribu.

“Kami tidak pernah melihat yang namanya Hera Syafana dan Rapika itu ada di SDN 67. Baik itu dari tahun 2005 sampai 2012 ini. Lalu siapa yang mengambil gaji mereka,”ujarnya.

Kecurigaan itu juga muncul dari pegawai lainnya di SDN 67/IV Telanaipura. Saksi lainnya mengaku tidak pernah mengenal dua nama tersebut ataupun bekerja sama di sekolah tersebut. Bahkan, dirinya yang mengaku setiap pengambilan gajinya sendiri dilakukan di ruang kepala sekolah. Saat itupun dirinya tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan siapa-siapa saja penerima honorer yang dibayarkan. Sehingga ketika itu, dirinya tidak mengetahui ada tenaga honorer “siluman” yang menjadi staf di sekolah itu.

“Setiap kami tandatangan pembayaran gaji, hanya beberapa detik saja. Lalu berkas itu langsung ditarik kepala sekolah. Sehingga tidak sempat memperhatikan siapa-siapa saja yang ikut menerima pembayaran gaji,”ujarnya.

Kecurigaan itu tidak hanya sebatas itu saja. Ketika ada pendataan database guru honorer di Diknas Kota Jambi, kedua nama staf fiktif itu terpilih masuk database. Sedangkan dirinya

yang telah mengabdikan dan bekerja secara nyata tidak terpilih masuk daftar database. Tetapi justru dua nama “siluman” itu muncul dan masuk database.

“Aku melihat sendiri nama keduanya di tahun 2010 itu masuk daftar database kategori II. Saat itu aku tidak sempat mengkopi karena dilarang oleh pihak Diknas,” ujarnya.

Diakukannya bahwa selama kurun waktu tujuh tahun mengabdikan diri di sekolah itu, sudah tiga kali mengalami kenaikan gaji honorer yang diterima. Pada tahun 2005, honorer guru kelas digaji sebesar 200 ribu. Tenaga tata usaha, staf dan penjaga sekolah digaji sebesar Rp 150 ribu. Penerimaan gaji sendiri dilakukan per tiga bulan. Dan sejak tahun 2010 sampai saat ini mereka telah menerima gaji perbulan sebesar Rp 300 ribu.

Ketika hal itu dikonfirmasi langsung kepada Kepala Sekolah SDN 67/IV Telanaipura Ali Musafak, yang bersangkutan terkejut. Seketika dirinya langsung membantah pernah menerima dan memperkerjakan dua nama, Hera Syafana dan Rapika.

“Tidak ada nama itu disekolah saya. Sejak tahun 2005 saya menjadi kepala sekolah tidak ada nama bersangkutan,” ujar Ali Musafak.

Namun, ketika dijelaskan bahwa ada bukti penerimaan gaji pada tahun 2005 yang ditandatangani oleh dirinya yang diberi stempel resmi sekolah. Ali Musafak terlihat gugup. Seketika nada suaranya berubah dan penjelasannya juga berubah seketika. “Mmmm...memang ada nama itu dulu. Kalau tidak salah masuk tahun 2005,” ujar Ali Musafak.

Lantas dirinya langsung mengetahui jabatan pasti kedua staf yang disebutkan dengan benar sesuai bukti yang ada. Menurut Ali Musafak, keduanya bekerja sebagai staf TU. Mereka bekerja dari tahun 2005 dan hanya selama tiga tahun.

Setelah itu, keluar dari sekolahnya.

Terkait tidak adanya guru lain yang menyaksikan bahwa ada tandatangan Hera Syafana dan Rapika dalam bukti penerimaan gaji, Ali Musafak tidak memberikan jawaban. Namun, dia mengakui telah mengeluarkan rekomendasi terhadap tenaga honorer yang hendak mengurus masuk daftar database. Ketika itu dirinya menjelaskan bahwa keduanya yakni Hera Syafana dan Rapika datang meminta rekomendasi, yang kemudian dirinya mengeluarkan rekomendasi tersebut.

Padahal penerimaan masuk database dilakukan pada tahun 2010. Sedangkan berdasarkan penjelasan Ali Musafak sendiri, Hera Syafana dan Rapika keluar tiga tahun sejak masuk di tahun 2005. Sama artinya ditahun 2008 keduanya sudah tidak lagi berada di SDN 67/IV.

“Saya memang mengeluarkan rekomendasi. Waktu itu mereka yang meminta untuk ngurus database. Hanya sebatas itu, kemudian saya tidak tahu lagi,” ujar Ali.

Saat dikonfirmasi kepada kepala BKD Kota Jambi, Amirullah, pihaknya tidak berkenan membuka data guru dan staf yang masuk database. Amirullah beralasan tidak sembarang orang bisa mengakses database pegawai sekolah tersebut. Untuk itu dia tidak memperlihatkan database atas nama Hera Syafana dan Rapika kepada Tribun.

“Data itu sudah kita kirimkan ke Pusat,” ujar Amirullah.

Meskipun tidak berkenan membuka arsip database atas nama Hera Syafana atau Rapika, Amirullah menegaskan, bila memang terjadi pemalsuan data atau manipulasi maka pihak pelaku dan kepala sekolah bisa terancam pidana.

Ancaman pidana itu berlaku karena pihak kepala sekolah dan yang bersangkutan saat mengurus administrasi database dimana diharuskan melengkapi bahan dengan disertai pernyataan

bahwa semua data yang diberikan benar adanya dan apabila data tersebut palsu maka akan ada konsekwensi hukum.

“Kita berikan syarat dengan membuat surat pernyataan. Nanti kalau memang itu palsu atau dipalsukan, maka ancaman pidana untuk mereka,” tegas Amirullah.

Amirullah menjelaskan bahwa untuk penerimaan database tahun 2010 haruslah memiliki pengabdian tidak terputus disekolah bersangkutan selama lima tahun berturut-turut. Hal itu dibuktikan dengan adanya SK yang ditandatangani sebelum 2 Januari 2005. Bila SK diatas tanggal itu, maka tidak bisa diterima masuk database.

Edy Syam, anggota DPRD Kota Jambi Ketua komisi D, mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum di Sekolah SDN 67/IV itu bila terbukti sudah sangat salah. Bahkan, kata dia, jika ada tindak pelanggaran pidana berupa pemalsuan dan merugikan keuangan Negara. Akan tetapi untuk membuktikan kerugian keuangan negara harus dilengkapi bukti audit dari pihak yang berwenang.

“Itu sangat fatal bila memang dilakukan. Kalau memang ada dugaan indikasi kerugian negara akibat honor terus mengalir sementara orangnya tidak ada, maka Diknas harus melaporkan itu ke polisi,” ujar Edi Syam. “Sedangkan untuk mengetahui kerugian negara yang ditimbulkan, harus melalui audit pihak yang berwenang.”

Kepala dinas Pendidikan Kota Jambi, Rifai begitu dikonfrimasi hal tersebut mengaku sangat terkejut. Lantas dirinya berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Pihak Dinas sendiri akan mencari bukti dan keterangan dari sekolah yang bermasalah tersebut.

“Saya belum mendengar ada persoalan seperti itu di SDN 67/IV Telanaipura. Karena saya juga baru dua bekerja

disini," ujar Rifai.

Meskipun begitu dirinya berjanji akan meminta penjelasan kepada bawahannya, terutama keterangan mengapa hal itu bisa terjadi dan tidak terpantau sekian tahun lamanya. Sehingga dirinya belum bisa memberikan keputusan apapun terkait perbuatan yang dilakukan.

"Saya baru mengetahui itu tapi nanti akan saya periksa. Dan bila itu memang melanggar, maka kita akan tindak sesuai aturan. Terkait nama yang tidak pernah ada namun masuk database akan kita anulir," ujar Rifai.

BENTUK TIM PENCARI FAKTA

A Somad, pengamat pendidikan Kota Jambi saat dimintai analisisnya mengatakan bahwa tindakan itu sangat mencoreng nama dunia pendidikan. Terutama dalam pemanfaatan dana BOS yang diperuntukan meringankan beban dunia pendidikan.

"Itu perbuatan keliru. Jelas di dalamnya mengandung unsur pidana, pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang serta merugikan keuangan negara," ujar Somad.

Somad menegaskan bahwa yang bertanggungjawab untuk kasus itu adalah Diknas Pendidikan Kota Jambi. Terutama sebagai bentuk tanggungjawab kelemahannya dalam mengawasi kinerja dan melakukan supervisi di sekolah bersangkutan. Terlebih hal itu terjadi dalam kurun waktu sekian tahun lamanya, kata dia.

"Ini sebuah bentuk keteledoran yang harusnya tidak terjadi. Sebab, sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan baru diketahui oleh pihak luar sekolah," ujar Somad.

Dia menyarankan agar Diknas Kota Jambi segera membentuk

tim untuk mengumpulkan bukti dan mencari fakta. Bila memang bisa dibuktikan, maka kepala sekolah yang bersangkutan dan pihak yang terkait termasuk dua nama siluman itu harus dipecat. Dan nama yang masuk database harus di-*blacklist*.

Tidak hanya itu, lanjut dia, bagi kepala sekolah juga bisa dicopot dari jabatannya. Apabila memang memiliki kerugiann negara harus segera dilakukan audit dan dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk kedua nama yang tidak pernah bekerja di sekolah tersebut hendaknya dikecualikan dengan mem-*blacklist* nama keduanya. Pencantuman nama kedalam daftar hitam tersebut untuk dua atau tiga tahun agar tidak diterima sebagai honorer dan seleksi PNS di instansi pemerintah. Tujuannya, kata Somad, itu akan menjadi efek jera bagi pelaku perbuatan serupa.

AKALI DANA BOS

1. SDN 128/1 HUTAN LINDUNG, MUARA BULIAN, BATANGHARI, JAMBI
Dugaan penyelewengan dana BOS Januari-Maret 2012 sebesar Rp 2,8 juta
 - Modus Kepsek palsukan tanda tangan bendahara sekolah
 - Buat pencairan insentif bendahara BOS, transportasi kegiatan, dan belanja barang Rp 1,4 juta
 - Uang transportasi pendamping O2SN Rp 1,2 juta
 - Uang buat bendahara Rp225 ribu, tapi bendahara tidak menerima

2. SD 115/VI BANGKO VIII, BANGKO, MERANGIN
Dugaan penyelewengan pengelolaan dana BOS Juni 2012
 - Modus Kepsek palsukan tanda tangan dan SPJ
 - Tahun 2012/2012, dana BOS Rp 90 juta/triwulan
 - Dua triwulan terakhir difuga bermasalah
 - Hasil audit Inspektorat Pemkab Merangin terindikasi pemalsuan SPJ dan tanda tangan guru penerima, karena guru mengaku tidak menerima

3. SDN 67/IV Jambi, Kota Jambi
Dugaan kebocoran dana BOS selama tiga tahun terakhir
 - Modus membayar honor tenaga guru fiktif lewat dana BOS
 - Besarnya per triwulan Rp 600 ribu
 - Terungkap dari bukti pengambilan honor BOS
 - Dua nama diduga fiktif, inisial HS dan R diketahui terima gaji



SUWOKO, terlahir di Kudus, 9 April 1985. Mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Lambangan Undaan Kudus, kemudian SMPN 01 Undaan Kudus, lalu menyelesaikan pendidikan menengah atas di MAN 2 Kudus. Menempuh studi lanjutan di FKIP BI Universitas Muria Kudus.

Kini bekerja sebagai Reporter di Harian *Warta Jateng*, Kompas Gramedia Group yang berada di Semarang.

Menjadi pengurus Divisi Program Aji Semarang.

JLA TERANCAM TAK BISA DIGUNAKAN

Oleh **Suwoko**

Dipublikasikan di Koran *Warta Jateng*

Para pemilik alat pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa (JLA), Kabupaten Semarang, mengancam akan memboikot jalan yang telah dibangun sejak tahun 2010 itu. Mereka, para pemilik excavator, truk dam, dan tanah uruk, terpaksa melakukan unjuk rasa karena belum mendapat bayaran dari subkontraktor. Ancaman tersebut kemungkinan memberi dampak pada tertundanya pemanfaatan JLA sebagai jalur mudik lebaran tahun 2012 ini.

Kuasa hukum para pemilik alat dan tanah urug Yonahes Subagio mengatakan dana yang belum dibayarkan subkontraktor kepada kliennya bernilai hingga ratusan juta rupiah. Beberapa pemilik truk dan bahkan ditipu oleh pihak subkontraktor dengan memberikan cek kosong senilai puluhan juta rupiah tetapi tidak bisa dicairkan.

“Mereka (para pemilik alat) telah menunggu pembayaran dari subkontraktor selama dua tahun. Kami telah berusaha meminta kepada banyak pihak agar ada penyelesaian pembayaran kepada klien kami. Namun hingga kini tidak ada pihak manapun, termasuk pemerintah, yang dapat menyelesaikannya,” tutur Yohanes dari Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum, di Semarang, Rabu (18/7).

Yohanes yang mengatasnamakan kliennya mengatakan, hingga saat ini, masih ada tunggakan yang belum dibayar oleh kontraktor, senilai sekitar Rp 600 juta. Nilai tersebut terbagi atas penyewaan *excavator*, dan tagihan truk dam tanah uruk. Tunggakan itu telah terakumulasi sejak Juni 2010 lalu, dimana pembayaran dari subkontraktor mulai macet.

JLA dibangun oleh pemerintah pusat guna memecah kemacetan di Pasar Projo, Ambarawa. Dijalur Bawen-Ambarawa selama ini sering terjadi penumpukan kendaraan dan terjadi kemacetan terutama di titik Pasar Projo. JLA dibangun dengan panjang jalan 7,3 kilometer serta lebar jalan 7,5 meter. Nilai kontrak proyek jalan lingkaran selatan Ambarawa itu mencapai Rp 23,5 miliar. Pembangunan JLA juga diharapkan dapat dijadikan jalur mudik Lebaran tahun ini.

Yohanes menjelaskan, pemerintah memberikan hak kuasa pembangunan kepada pihak ketiga sebagai pemenang lelang atas nama PT Duta Graha Indah (PT DGI) yang saat ini tersangkut kasus suap proyek Wisma Atlet di Hambalang. PT DGI, men-subkontrakkan ke PT Dolatras Jaya yang beralamat di Jakarta. Subkontraktor menyewa alat-alat pembangunan itu, kepada para pemilik alat yang sebagian besar beralamat di Semarang.

“Banyak warga Semarang, menjelang pembangunan JLA, membeli truk dan dengan cara mengangsur. Mereka berharap mendapat keuntungan dari pembangunan JLA. Namun, justru mereka harus menanggung hutang karena tidak dapat mengangsur. Bahkan, beberapa orang harus disita truknya,” keluh Yohanes.

Segala upaya, kata Yohanes, telah dia lakukan bersama dengan kliennya. Antara lain, beberapa kali mendatangi alamat resmi PT Dolatras di Jakarta. Mereka hanya menemukan

sebuah rumah berukuran kecil, yang tak nampak ada aktivitas kantor sebagaimana kantor kontraktor.

“Kami tidak melihat satupun alat berat disana. Kami sangat curiga dengan kantor Dolatrass itu. Bahkan, tidak nampak sedikitpun aktivitas kantor, karena tidak ada fasilitas kantor sebagaimana kantor pada umumnya,” katanya.

Upaya tersebut, kata Yohanes, gagal mendapat pembayaran yang diinginkan. Selain itu, pihaknya juga berupaya dengan mendatangi kantor PT DGI di Jakarta, namun upaya yang dilakukan berkali-kali itu juga memaksa mereka harus pulang dengan tangan hampa. Dan mereka telah mengajukan permohonan mediasi antara kliennya dan PT Dolatras Jaya dan PT DGI kepada Dinas Binamarga Jateng, awal Juli lalu.

“Permohonan kami ditanggapi positif oleh Binamarga. Kami dimediasi dengan pihak Dolatrass, di Kantor Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Wilayah II Provinsi Jateng, 9 Juli lalu. Namun, pertemuan tersebut buntu, atau tidak menghasilkan kesepakatan apapun,” keluhnya.

Yohanes menengarai, terjadi penyelewengan dana dalam pembangunan JLA. Dia pernah mendapat informasi dari orang dalam Binamarga bahwa dana yang digunakan untuk pembangunan JLA hanya sekitar 48 persen dari total nilai kontrak. Sedangkan 52 persen lainnya, dibagi-bagi ke sejumlah pejabat, sebagai imbal jasa proyek tersebut. Selain itu, sisa dana itu juga bocor ke sejumlah pihak lain di luar pejabat pemerintahan.

“Kalau dana bocor di sana-sini, ya habis *to mas* dananya. Padahal, pemenang lelang proyek PT DGI juga mensubkontrakkan ke perusahaan lain, yakni PT Dolatrass. Akhirnya ya, klien kami ini yang menjadi korban, tidak kebagian dananya,” keluh Yohanes.

Indikasi penyelewengan itu, kata dia, juga terlihat adanya serah-terima bangunan, antara pihak pembangun dengan Binamarga. Padahal, setelah pertemuan dengan PT Dolatrass yang difasilitasi Pejabat SNVT, telah ada kesepakatan, serah-terima akan ditunda, hingga ada kepastian pembayaran. Acara itu terkesan sembunyi-sembunyi dan dipercepat waktunya, sehingga terkesan ada perlindungan Binamarga terhadap PT DGI dan PT Dolatrass.

“Mereka seolah saling menutupi dan melindungi. Ini semakin menguatkan pernyataan seorang pejabat Binamarga kepada saya bahwa memang ada penyelewengan dana di proyek JLA,” tuturnya.

Yahanes bersama dengan kliennya sangat kaget bahwa JLA akan diresmikan menteri dalam waktu dekat ini. Pasalnya, dengan peresmian dan serah terima JLA, hak mereka yang menjadi tanggungan pihak kontraktor, semakin bias.

“Oleh karenanya, para pemilik alat bersiap menggagalkan acara peresmian itu. Kami menuntut, agar hak para pemilik alat dipenuhi terlebih dahulu, sebelum JLA diresmikan,” ujarnya.

Sementara itu, saat dihubungi terpisah, kemarin, Kepala Satuan Kerja non-Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Jateng Herman Suroyo mengaku belum bisa diganggu. Karena dirinya tengah melakukan rapat dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta. Demikian juga dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Jateng Urip Sihabuddin juga tidak bersedia dikonfirmasi atas ancaman penutupan jalur mudik Lebaran tersebut. “Maaf mas, saya sedang tidak bisa diganggu. Posisi saya sedang di Jakarta, tengah rapat dengan Pak Wakil Menteri (PU),” kata Herman.

